

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum lokasi penelitian

##### 4.1.1 Arti lambang kabupaten blitar



**Gambar 4.1 lambang kabupaten blitar**

Sumber : website resmi pemerintah kabupaten blitar

Lambang Daerah Kabupaten Blitar terdiri dari 9 (sembilan) bagian dengan bentuk, macam dan maknanya sebagai berikut:

1. Bentuk seluruhnya merupakan segi lima : Lambang Pancasila.
2. Candi penataran : Peninggalan Majapahit sebagai lambang kebudayaan yang luhur.
3. Keris Pusaka : Lambang semangat dan jiwa kepahlawanan rakyat Blitar, sejak masa dahulu hingga sekarang.

4. Sungai brantas dengan warna biru diatas dasar warna hijau dan kuning : Lambang kemakmuran, membagi daerah Blitar, menjadi 2 bagian, yang sebelah utara sungai daerah makmur dan sebelah selatan daerah kurang makmur.
5. Pangkal keris dengan bentuk gunung dengan api yang menyalanyala : Lambang kedinamisan rakyat Blitar yang tak putus asa, dan patah semangat, malahan semakin membaja, pantang mundur dalam berjuang dalam menghadapi malapetaka.
6. Pohon beringin : Lambang pengayoman pemerintahan yang diharapharapkan oleh rakyat demi keadilan.
7. Segi 5 (lima) ditengah warna biru muda : Lambang kegotongroyongan dalam suasana aman dan damai.
8. Padi kapas : Lambang sandang dan pangan kemakmuran buah kapas = 8 dan butir padi = 17 mengingatkan kita kepada cita-cita revolosi 17 – 8 – 45.
9. Pita dwiwarna dengan bintang emas bersudut lima diatas dasar : Lambang jiwa kepemimpinan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

#### **4.1.2 Visi, Misi Kabupaten Blitar**

##### **Visi kabupaten blitar**

Pemerintahan Kabupaten Blitar dibawah kepemimpinan Drs. H. Rijanto, MM dan Marhaenis Urip Widodo, S Sos selama peroide 2016 – 2021 menetapkan visi :

**“ MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING”.**

Adapun penjabaran dari visinya adalah sebagai berikut:

**Lebih Sejahtera**, berarti meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Secara lahir adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara baik, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kesejahteraan secara batin diwujudkan dalam penciptaan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif, serta adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

**Maju**, dimaknai dengan adanya perkembangan positif dalam setiap aspek kehidupan masyarakat terutama terkait dengan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM), tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik .

**Berdaya Saing**, yaitu terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Blitar untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional.

**Misi Kabupaten Blitar**

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Blitar tersebut maka Misi Pembangunan Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan program pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran ;
2. Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupan sosial, serta penerapan peraturan perundang-undangan ;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat melalui peningkatan mutu bidang pendidikan (termasuk di dalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai ;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi ;
5. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup ;
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

### 4.1.3 Letak geografis

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah di Propinsi Jawa Timur yang secara geografis Kabupaten Blitar terletak pada 111 25' – 112 20' BT dan 7 57-8 9'51 LS berada di Barat daya Ibu Kota Propinsi Jawa Timur – Surabaya dengan jarak kurang lebih 160 Km. Adapun batas – batas wilayah adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang

Sebelah Timur : Kabupaten Malang

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri

Kabupaten Blitar memiliki luas wilayah 1.588.79 KM dengan tata guna tanah terinci sebagai Sawah, Pekarangan, Perkebunan, Tambak, Tegal, Hutan, Kolam Ikan dan lain-lain, Kabupaten Blitar juga di belah aliran sungai Brantas menjadi dua bagian yaitu Blitar Utara dan Blitar Selatan yang sekaligus membedakan potensi kedua wilayah tersebut yang mana Blitar Utara merupakan dataran rendah lahan sawah dan beriklim basah dan Blitar Selatan merupakan lahan kering yang cukup kritis dan beriklim kering. Wilayah Blitar selatan terus berusaha mengembangkan segala potensi yang dimiliki.

Daya tarik Potensi dan kekayaan yang dimiliki Kabupaten Blitar bukan hanya pada sumber daya alam, produksi hasil bumi yang melimpah, hasil – hasil peternakan, perikanan dan deposit hasil tambang yang tersebar di wilayah Blitar Selatan, tetapi juga kekayaan budaya serta peninggalan sejarah yang mempunyai nilai adiluhung menjadi kekayaan yang tidak ternilai. Namun lebih dari itu,

berbagai kemudahan perijinan dan iklim investasi (usaha) yang kondusif didukung oleh stabilitas sosial politik merupakan modal utama yang dapat menjadi “point of essential” terutama jaminan bagi investor dan seluruh masyarakat untuk melibatkan diri dalam pengembangan Kabupaten Blitar.

Kabupaten Blitar juga tercatat sebagai salah satu kawasan yang strategis dan mempunyai perkembangan yang cukup dinamis. Kabupaten Blitar berbatasan dengan tiga kabupaten lain, yaitu sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Malang, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri sedangkan sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang. Sementara itu untuk sebelah Selatan adalah Samudera Indonesia yang terkenal dengan kekayaan lautnya. Apabila diukur dari atas permukaan laut, maka Kabupaten Blitar mempunyai ketinggian  $\pm 167$  meter dan luas 1.588,79 km<sup>2</sup>. Di Kabupaten Blitar terdapat Sungai Brantas yang membelah daerah ini menjadi dua yaitu kawasan Blitar Selatan yang mempunyai luas 689,85 km<sup>2</sup> dan kawasan Blitar Utara, Blitar Selatan termasuk daerah yang kurang subur. Hal ini disebabkan daerah tersebut merupakan daerah pegunungan yang berbatu, dimana batuan tersebut cenderung berkapur sehingga mengakibatkan tanah tandus dan susah untuk ditanami. Sebaliknya kawasan Blitar Utara termasuk daerah surplus karena tanahnya yang subur, sehingga banyak tanaman yang tumbuh dengan baik. Salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kesuburan tanah di kawasan Blitar Utara adalah adanya Gunung Kelud yang masih aktif serta banyaknya aliran sungai yang cukup memadai. Gunung berapi

dan sungai yang lebar berfungsi sebagai sarana penyebaran zat-zat hara yang terkandung dalam material hasil letusan gunung berapi.

Blitar terletak dikaki lereng gunung Kelud di Jawa Timur. Daerah Blitar selalu dilanda lahar gunung Kelud yang meledak secara berkala sejak zaman kuno sampai sekarang. Lahar mengalir kebawah melalui lembah-lembah sungai dan membeku menutup permukaan bumi. Abu yang memancar dari bawah gunung berapi akhirnya jatuh juga di permukaan bumi dan bercampur dengan tanah. Lapisan-lapisan tanah vulkanik daerah Blitar pada hakekatnya merupakan suatu kronologi tentang ledakan-ledakan gunung Kelud yang kontinu dari zaman dahulu kala.

Geologis tanah daerah Blitar berupa tanah vulkanik yang mengandung abu ledakan gunung berapi, pasir dan napal (batu kapur bercampuran tanah liat). Warnanya kelabu kekuning-kuningan. Sifatnya masam, gembur dan peka terhadap erosi. Tanah semacam itu disebut tanah regosol yang dapat digunakan untuk penanaman padi, tebu tembakau dan sayur-sayuran. Disamping sawah yang sekarang mendominasi pemandangan alam daerah sekitar Kota Blitar ditanam pula tembakau di daerah ini. Tembakau ini ditanam sejak zaman Belanda berhasil menaruh daerah ini dibawah jurisdiksinya dalam Abad XVII. Bahkan pernah maju-mundur Blitar ditentukan oleh berhasil tidaknya produksi tembakau di daerah ini. Sungai Brantas mengalir memotong daerah Blitar dari Timur ke Barat. Disebelah Selatan sungai Brantas (daerah Blitar Selatan) kita menjumpai tanah yang lain lagi jenisnya. Tanah ini tergolong dalam apa yang disebut

grumusol. Tanah grumusol merupakan batu-batuan endapan yang berkapur di daerah bukit maupun gunung. sifatnya basah.

#### **4.1.4 Aspek demografis**

Penduduk merupakan salah satu potensi bagi Kabupaten Blitar untuk menggerakkan pembangunan, namun sebaliknya menjadi permasalahan apabila kualitas sumberdaya manusianya masih rendah. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas SDM yang tinggi akan sangat mendukung pemerintah dalam mencapai tujuan-tujuan kesejahteraan masyarakat. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Blitar pada tahun 2015 mencapai 1.140.793 jiwa, terdiri dari penduduk perempuan 569.490 jiwa dan laki – laki 571.303 jiwa dengan sex rasio sebesar 100,32 persen yang berarti dalam 100 jiwa penduduk perempuan ada sebanyak 100-101 jiwa penduduk laki-laki. Adapun tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Blitar mencapai 0,80% dengan kepadatan penduduk rata-rata 729 km<sup>2</sup>. sebaran penduduk di kabupaten blitar untuk masing-masing kecamatan pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

*Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin serta Sex Ratio Kabupaten Blitar Tahun 2014*

KECAMATAN	JENIS KELAMIN		TOTAL	SEX RATIO (Rasio Jenis Kelamin)
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
Bakung	12.463	13.000	25.463	95,87
Wonotirto	17.856	17.696	35.552	100,90
Panggungrejo	20.558	20.657	41.215	99,52
Wates	14.083	14.058	28.141	100,18
Binangun	21.375	21.358	42.733	100,08
Sutojayan	23.550	24.120	47.670	97,64
Kademangan	32.454	32.506	64.960	99,84
Kanigoro	38.357	37.751	76.108	101,61
Talun	30.086	30.341	60.427	99,16
Selopuro	20.180	19.579	39.759	103,07
Kesamben	23.902	24.542	48.444	97,39
Selorejo	17.250	17.674	34.924	97,60
Doko	18.849	18.898	37.747	99,74
Wlingi	25.156	25.012	50.168	100,58
Gandusari	33.542	32.974	66.516	101,72
Garum	32.439	31.898	64.337	101,70
Nglegok	34.881	34.504	69.385	101,09
Sanankulon	27.623	27.619	55.242	100,01
Ponggok	50.768	49.535	100.303	102,49
Srengat	32.102	32.339	64.441	99,27
Wonodadi	23.331	23.413	46.744	99,65
Udanawu	20.498	20.016	40.514	102,41
<b>TOTAL</b>	<b>571.303</b>	<b>569.490</b>	<b>1.140.793</b>	<b>100,32</b>

*Radhyanto.org*

**Gambar 4.2 data kependudukan kabupaten blitar 2014**

Sumber: situs resmi BPS kabupaten blitar

Komposisi penyebaran penduduk di masing-masing wilayah kecamatan di seluruh kabupaten blitar, memperlihatkan bahwa kecamatan ponggok berpenduduk paling banyak diantara 22 kecamatan yang ada, yaitu sebanyak 100.303 jiwa. Kepadatan penduduk menunjukkan wilayah terpadat adalah kecamatan sanankulon.

## **4.2 Gambaran Umum situs penelitian**

### **4.2.1 Desa Bendosewu**

#### **Sejarah Desa**

##### 1. asal usul / legenda desa.

Konon menurut cerita yang telah banyak beredar di masyarakat warga desa bendosewu yang dikuatkan dengan keterangan dari sesepuh desa bernama suyatno (almarhum) mantan perangkat desa yang tadinya menjabat sebagai kepala dusun (kamituwo) dusun bendosewu, dahulu di area sekitar kantor desa yang sekarang ini adalah merupakan hutan belantara yang di tumbuhinya pohon bendo. Sehingga desa ini dinamakan “BENDOSEWU”.

##### 2. Sejarah pemerintahan desa

Sebagai desa di dalam wadah negara kesatuan republic Indonesia desa BENDOSEWU sebagaimana desa-desa yang lain disekitarnya adalah merupakan bagian dari wilayah kecamatan talun. Adapaun secara ringkas kondisi pemerintah desa dapat di rinci:

A. Sebelum UU no. 5. Tahun 1979 tentang desa. Pada saat itu pemerintahan desa memakai tradisi kuno dengan sebutan terhadap petugas desa sebagai lurah, carik, kamituo, kebayon, jogotirto, jogoboyo dan modin.

B. Adanya UU no. tahun 1979 banyak perubahan terjadi pada struktur pemerintah desa yang secara nasional desa-desa di Indonesia diseragamkan, sebutan pamong desa dikenal dengan perangkat desa yang antara lain perubahan nama-nama jabatan kepala desa (masa jabatan 8 tahun), sekretaris desa, kepala urusan dan

kepala dusun sampai sekarang ini. Sedangkan lembaga legislatif adalah lembaga musyawarah desa (LMD).

C. desa berdasarkan UU no. 5 tahun 1999, hal yang menonjol pada masa saat ini, adalah jabatan kepala desa menjadi 2 kali 5 tahun atau 10 (sepuluh) tahun. Sedangkan legislatif pada era ini adalah badan permusyawaratan desa (BPD)

D. undang-undang nomor 32 tahun 2004, masa jabatan kepala desa menjadi 6 tahun, dan sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang ada di kabupaten/kota. Sedangkan BPD beralih menjadi badan permusyawaratan desa.

E. undang-undang republic Indonesia nomor 6 tahun 2014, masa jabatan kepala desa menjadi 6 tahun, dan sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang ada di kabupaten/kota. Sedangkan BPD beralih menjadi badan permusyawaratan desa.

### 3. Kepemimpinan Desa

Berdasarkan kisah nenek monyang yang diceritakan secara turun temurun desa bendosewu dibentuk oleh sekumpulan orang yang merupakan pelarian dari kerajaan mataram akibat kekalahan dalam perang yang akhirnya menyelamatkan diri dengan pergi ke pulau jawa timur dan menetap di sebuah desa pada tahun 1823 ada seorang yang bernama singo penganti yang juga anak buah ari pangeran diponegoro beliau merupakan hutan belantaran dan banyak ditumbuhi pohon bendo hingga akhirnya beliau menamakan desa ini dengan sebuah nama desa bendosewu. Adapun kepala desa yang pernah menjabat hingga seakarang adalah sabagai berikut:

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| A. Bapak Kartojudo             | ( Tahun 1839 – 1889 )                  |
| B. Bapak Kertomedjo            | ( Tahun 1889 – 1904 )                  |
| C. Bapak Darjo                 | ( Tahun 1904 – 1915 )                  |
| D. Bapak Atmowidjoyo           | ( Tahun 1915 – 1932 )                  |
| E. Bapak Kartoharjo            | ( Tahun 1932 – 1946 )                  |
| F. Bapak M.Romeli              | ( Tahun 1946 – 1971 )                  |
| G. Bapak Marhaban              | ( Tahun 1971 – 1978 )                  |
| H. Bapak Aspar                 | ( Tahun 1978 – 1991 )                  |
| I. Bapak Munawir Muchsin       | ( Tahun 1991 – 2007 )                  |
| J. Bapak Moh Anwar Zen S. S.Ag | ( Tahun 2007 – 2013 )                  |
| K. Ibu Sri Unaryani            | ( Tahun 2013 Sampai Sdengan Sekarang ) |

#### **4.2.2 Kondisi Geografis**

secara geografis desa bendosewu terletak pada posisi 7°21-7°31 LS dan 110°10-110°40 BT. Topografi desa ini adalah berupa dataran tinggi dengan ketinggian yaitu sekitar 274 m di atas permukaan air laut. Letak desa bendosewu berada diantara tiga desa lain yang juga maih termasuk dalam wilayah kecamatan talun kabupaten blitar. Adapun batas desa tersebut adalah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Wonorejo
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Jabung
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Jeblog
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Duren

Sebagian Wilayah Desa Bendosewu merupakan tanah dataran dan sebagian besar merupakan tanah persawahan yang baik untuk perikanan & bercocok tanam seperti Padi, Jagung, dll.

#### **4.2.3 Kondisi Fisik Desa**

Desa bendosewu merupakan wilayah yang terdiri dari pemukiman penduduk, tanah tegalan, perkebunan rakyat, lahan persawahan dengan luas wilayah desa 4,99 km<sup>2</sup> atau 10.22 Ha. Dimana seluas 188 Ha adalah pemukiman penduduk dan sisanya adalah lahan kering dan areal persawahan. Wilayah desa talun dilewati sungai brantas sepanjang, iklim desa bendosewu berdasarkan data BPS kabupaten blitar 2013, selama tahun 2016 curah hujan di desa bendosewu rata-rata mencapai 2.400 mm. curah hujan di desa bendosewu terbanyak terjadi pada bulan desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2015-2020.

#### **4.2.4 Aspek Demografis**

berdasarkan data administrasi pemerintahan desa tahun 2015, jumlah penduduk desa bendosewu adalah terdiri dari 1.800 KK, dengan jumlah total 6.361 jiwa, dengan rincian 3.003 laki-laki dan 3.358 perempuan, sebagaimana tertera pada label berikut:

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia Sampai Dengan Desember 2015 Desa Bendosewu**

No	Usia	Laki-laki	perempuan	jumlah	Prosentase
1	0-4	261 orang	266 orang	527 orang	7,3 %
2	5-9	313 orang	303 orang	616 orang	8.0 %
3	10-14	215 orang	305 orang	520 orang	9,0 %
4	15-19	307 orang	307 orang	614 orang	9,2 %
5	20-24	230 orang	248 orang	478 orang	9,2 %
6	25-29	236 orang	236 orang	472 orang	8,6 %
7	30-34	208 orang	208 orang	416 orang	8,4 %
8	35-39	207 orang	220 orang	427 orang	8,2 %
9	40-44	171 orang	207 orang	378 orang	8,4 %
10	45-49	176 orang	175 orang	378 orang	6,5 %
11	50-54	161 orang	173 orang	334 orang	5,9 %
12	55-58	146 orang	171 orang	317 orang	6,4 %
13	>59	372 orang	539 orang	911 orang	4.9 %
<b>Jumlah total</b>		3.003 orang	3.358 orang	6.361 orang	100,0%

Sumber: laporan tahunan desa bendosewu kecamatan talun kabupaten blitar 2015

Dari data di atas nampak bahwa penduduk usia produktif pada usia 15-54 tahun desa bendosewu sekitar 3.814 atau hampir 71% hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan SDM.

#### 4.2.5 Aspek Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk desa bendosewu Rp 50.000 per hari. secara umum mata pencharian warga masyarakat desa bendosewu dapat teridentifikasi kedalam beberapa sector, yaitu pertanian, jasa/perdagangan, industry dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sector pertanian berjumlah 635 orang, sedangkan yang bekerja di sector jasa sejumlah 30 orang, yang bekerja di sector industry 89 orang, dan yang bekerja di sector lain-lain 689 orang, dengan demikian jumlah penduduk yang mempunyai

mata pencaharian berjumlah 3.073 orang. Berikut adalah jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian:

**Tabel 4.2**  
**Mata Pencaharian Masyarakat**

No	Mata pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	1.114 orang	50,62 %
2	Jasa/perdagangan		
	- jasa pemerintahan	108 orang	3,47 %
	- jasa perdagangan	316 orang	10,38 %
	- Jasa angkutan	109 orang	3,33 %
	- jasa keterampilan	158 orang	5,24 %
	- jasa lainnya	223 orang	7,83 %
3	Sector industry	178 orang	5,91 %
4	Sector lain	395 orang	13,61 %
Jumlah		3.073 orang	100 %

Sumber: laporan tahunan desa bendosewu kecamatan talun kabupaten blitar 2016

Dengan melihat data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa angka pengangguran di desa bendosewu masih cukup rendah. Berdasarkan data sebelumnya penduduk usia 20-55 yang belum bekerja berjumlah 139 orang dari angka kerja sekitar 2.451 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di desa bendosewu.

#### **4.2.6 Kondisi Pemerintahan Desa**

1). Pembagian wilayah desa

Wilayah desa bendosewu terdiri dari 4 dusun:

1. dusun bendosewu

2. dusun bakulan
3. dusun bendorejo
4. dusun tawang

Yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dusun. Posisi kasun menjadi sangat strategi seiring banyaknya limbah tugas desa kepada aparat ini. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan terhadap masyarakat di desa bendosewu dari empat dusun tersebut terbagi menjadi 8 rukun warga (RW) dan 35 rukun tetangga (RT).

#### **4.2.7 Struktur Organisasi Pemerintah Desa**

Keberadaan rukun tetangga (RT) sebagai bagian dari satuan wilayah pemerintahan desa bendosewu memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut, terutama terkait hubungannya dengan pemerintahan pada level di atasnya. Dari kumpulan rukun tetangga inilah sebuah pedukuhan (rukun warga; RW) terbentuk.

Sebagai sebuah desa, sudah tentu struktur kepemimpinan desa bendosewu tidak bisa lepas dari struktur administrative pemerintahan pada level di atasnya. Lebih lanjut struktur administarif pemerintahan desa bendosewu yang menjabat dalam struktur pemerintahan desa bendosewu, seperti berikut:

**Table 4.3 Nama Pejabat Pemerintah Desa Bendosewu**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1	Sri unaryani	Kepala desa
2	Rudianto	Sekretaris desa

3	Supangat	Kepala urusan pemerintahan
4	Sribut	Kepala urusan keuangan
5	Siswanto	Kepala urusan kesra
6	Wasis	Kasun bendosewu
7	Isnari	Kasun bakulan
8	Mukarom	Kasun tawang
9	-	Kasun bendorejo

Sumber: data RPJM desa bendosewu 2015-2020

**Table 4.4 Nama Badan Permusyawaratan Desa Bendosewu**

No	Nama	Jabatan
1	Sutopo	Ketua
2	Musta'in	Sekretaris
3	m. saifudin	Bendahara
4	Sutisno	Anggota
5	Nur rosid	Anggota
6	Dono wasis	Anggota
7	Suwarno	Anggota

Sumber : data RPJM desa bendosewu 2015-2020



**Gambar 4.3** struktur pemerintahan desa bendosewu

Sumber: dokumen peneliti



**Gambar 4.4** Kantor Desa Bendosewu Tampak Dari Depan

Sumber: dokumen peneliti

### **4.3 Penyajian Data Fokus Penelitian**

#### **4.3.1 Kemitraan Kepala Desa Dengan Perangkat Desa Bendosewu Untuk Meningkatkan Partisipasi masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktural Desa**

Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pemberdayaan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu sendiri. Kemitraan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa disini berarti bahwa dalam melaksanakan tugas pembangunan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat, semua aparatur Pemerintahan Desa, baik itu Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Badan Perwakilan Desa harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnyamasing-masing. Sehingga dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa semua aparatur pemerintah desa dalam hubungannya bermitra dengan baik sehingga dapat menciptakan sinergi yang baik dan tepat dalam meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang profesional dan akuntabel.

Menurut Beryl Levinger dan Jean Mulroy (2004), ada empat jenis atau tipe kemitraan yaitu:

a) *Potential Partnership*

Pada jenis kemitraan ini pelaku kemitraan saling peduli satu sama lain tetapi belum bekerja bersama secara lebih dekat.

b) *Nascent Partnership*

Kemitraan ini pelaku kemitraan adalah partner tetapi efisiensi kemitraan tidak maksimal

c) *Complementary Partnership*

Pada kemitraan ini, partner/mitra mendapat keuntungan dan penambahan pengaruh melalui perhatian yang besar pada ruang lingkup aktivitas yang tetap dan relatif terbatas seperti program delivery dan resource mobilization.

d) *Synergistic Partnership*

Kemitraan jenis ini memberikan mitra keuntungan dan pengaruh dengan masalah pengembangan sistemik melalui penambahan ruang lingkup aktivitas baru seperti advokasi dan penelitian.

Kepala desa merupakan pemegang kendali utama dari suatu pemerintahan desa, maka kepemimpinan yang baik harus dimiliki oleh kepala desa agar menciptakan kemitraan yang baik dan menghasilkan sinergi yang efektif untuk kepentingan desa. Kepemimpinan merupakan kemampuan atau usaha yang dilakukan seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain agar mereka mau secara sukarela melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan. Dalam mempengaruhi orang lain, tentu seorang pemimpin memiliki gaya atau ciri khas sendiri yang membedakan dirinya dengan yang lain yang ditujukan kepada masyarakat beserta lingkungan sekitar dalam sebuah organisasi. Harus difikirkan oleh pemimpin yaitu bagaimana dia mampu bekerja sama dengan aparatur desanya untuk mempengaruhi masyarakat agar mau bekerja sama guna

mencapai tujuan yang ingin dicapai sebelumnya. Untuk mempengaruhi masyarakat agar mau terlibat dalam pembangunan yang ada, dibutuhkan juga perangkat desa yang kuat, sebab masyarakat akan terlibat dengan baik apabila perangkat dari desa sendiri memiliki kerjasama yang baik untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat.

Dalam melaksanakan kinerja untuk mempengaruhi perangkat desa dan masyarakat, kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala desa melihat situasi dan kondisi yang ada. Seperti yang disampaikan oleh ibu sri unaryani selaku kepala desa Bendosewu :

“dalam pelaksanaan kepemimpinan saya saat ini, berbicara tentang tipe-tipe kemitraan yang saya pelajari, saya gunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat saya melakukannya tidak Cuma dengan satu tipe kemitraan saja. Hal itu juga melihat masyarakat desa Bendosewu disini cukup beragam, dan juga melihat kondisi setiap saat yang berbeda-beda misalnya dalam mengambil keputusan saya diharuskan untuk lebih tegas namun dalam berkomunikasi saya lakukan dengan lebih santai dengan alasan memang kondisi kedua tersebut tidak sama. Dalam berkomunikasi saya lebih cenderung ingin menciptakan suasana yang kekeluargaan sehingga antara saya, perangkat desa dan masyarakat bisa lebih akrab sehingga tujuan yang diinginkan diharapkan lebih dapat cepat tercapai”

(Wawancara dilakukan di Kantor Desa Bendosewu pada hari Rabu, 01 februari pukul 10:15)

Selain itu hal serupa juga dipaparkan oleh Bapak rudianto selaku sekretaris desa Bendosewu:

“memang dalam melakukan kinerjanya untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat, sebelum itu Bapak Bowo memperkuat dulu kinerja dari perangkat desanya, memang disini saya merasa adanya perbedaan antara kepemimpinan yang dahulu dan sekarang. Bapak Bowo disini pada kenyataannya yang terjadi sehari-hari baik dalam mengambil keputusan, berkomunikasi, memberikan motivasi dan juga pengawasan, beliau lakukan dengan berbeda cara sesuai dengan kondisi seperti apa yang ada. Selain itu dalam kinerja sehari-

hari Kepala Desa lebih menerapkan sistem kekeluargaan dan tidak mematok pada struktur tugas yang ada. Jadi memang baliu menciptakan suasana kerja yang nyaman mungkin di Kantor Desa” (Wawancara dilakukan dirumah Bapak Roni pada hari rabu, 1 februari 2017 pukul 16:30)

Lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana kemitraan yang dijalin antaran kepala desa Bendosewu dengan perangkat desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan Desa, maka peneliti akan menyajikan dalam bentuk tulisan sebagai berikut :

#### **A. Pengambilan Keputusan Oleh Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Bendosewu**

Pengambilan keputusan merupakan hal terpenting dalam berjalanya sebuah organisasi bagi seorang pemimpin. Kepala Desa disini merupakan seorang pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja desa dan dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagai urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Oleh karena itu sebagai seorang pemimpin, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk mengambil keputusan dalam setiap tindakanya di dalam dan luar lingkup organisasi.

Dalam sebuah program pembangunan yang ada di tingkat Desa, seorang Kepala Desa sebagai pemimpin formal di daerah itu mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan dalam program pembangunan yang ada. Setiap keputusan harus dibuat oleh Kepala Desa agar masyarakat dapat melaksanakan program yang ada dan ikut berpartisipasi dalam program yang sudah ditetapkan guna mewujudkan tujuan pembangunan yang sudah ditetapkan. Pengambilan keputusan

oleh seorang Kepala Desa harus adil dengan mempertimbangkan segala aspek yang ada agar keputusan yang diambil tidak memihak pada satu kepentingan. Hal tersebut dilakukan agar tidak timbul kecemburuan sosial dan konflik antar masyarakat. Kepala Desa juga dituntut cermat dalam mencari alternatif untuk memecahkan sebuah permasalahan yang ada. Oleh karena itu proses pengambilan keputusan oleh Kepala Desa harus transparan, dapat dipertanggungjawabkan serta melibatkan masyarakat dalam setiap prosesnya. Pada proses pengambilan keputusan oleh Kepala Desa memungkinkan adanya pengambilan keputusan secara sepihak ataupun bersama.

Seperti yang disampaikan oleh bapak ashuri selaku Ketua RW 01 Desa

Bendosewu :

“sejauh ini pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Kepala Desa diambil lewat musyawarah atau rapat desa yang di dalamnya kita sama-sama memberikan pendapat dan saran terkait masalah yang dibahas”.

(Wawancara dilakukan di kediaman Bapak ashuri selaku Ketua RW 01 Desa Bendosewu pada hari Kamis, 2 februari 2017 pukul 18:30)

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak rosin selaku Ketua RW 04

Desa Bendosewu :

“...biasanya saat rapat kita selalu ditanya lingkungan yang seperti apa yang diminta masyarakat, jadi kita berkumpul di rapat para ketua RW menyampaikan apa yang dibutuhkan masyarakat. Lalu oleh kepala Desa yang mengambil keputusan dengan minta persetujuan kita....”

(Wawancara dilakukan di kediaman Bapakrosin selaku ketua RW 04 Desa Bendosewu pada hari jumat, 3 februari 2017 pukul 17:00)

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak tabri selaku Ketua RW 6

Desa Bendosewu :

“sejauh ini, mengenai pengambilan keputusan yang dilakukan kepala desa melalui musyawarah bersama yang kemudian disampaikan oleh

Kepala Desa dan saya sebagai Ketua RW mensosialisasikan apa yang telah disampaikan pemimpin tentang adanya kegiatan pembangunan ke masyarakat”.

(Wawancara dilakukan di kediaman Bapak tabri selaku ketua RW 03 Desa Bendosewu pada hari Sabtu, 04 februari 2017 pukul 18:20)

Selain itu hal serupa juga dipaparkan oleh Bapak rudianto selaku

sekretaris Bendosewu :

“dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan Kepala Desa memang selalu melibatkan masyarakat dan juga aparat Desa di dalamnya, dalam pengambilan keputusan ini Kepala Desa lebih bersifat formal dibanding dengan kondisi lainya, dimana memang dalam pengambilan keputusan Kepala Desa dituntut sebagai puncak organisasi yang harus secara tegas mengambil keputusan”

(Wawancara dilakukan di rumah Bapak rudianto pada hari Sabtu, 11 februari 2017 pukul 16:30)

Selain itu, Kepala Desa Bendosewu juga menambahkan pernyataan

mengenai pengambilan keputusan yang dilakukanya, yaitu sebagai berikut :

“mengenai masalah pengambilan keputusan memang sepenuhnya ada ditangan kita sebagai pemerintah Desa, namun disini kita juga belajar dari peraturan yang ada terkait. Kita punya petunjuk atau dasar pengambilan keputusan yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 disertai PP dan lainya agar tidak melenceng dengan peraturan di atasnya. Contohnya pengambilan keputusan untuk proyek pembangunan, kita menyusun perencanaan dulu dengan Lembaga Pengendali Masyarakat Desa dengan dilakukan rapat desa yang melibatkan RT, RW, pemuka Masyarakat termasuk wakil dari perempuan. Lalu dirumuskan dulu dengan tim perumus yang selanjutnya dirapatkan lagi dengan Badan Permusyawaratan Desa apabila setuju, lalu diambil keputusan yang langsung kita terbangkan ke pemerintah daerah lewat camat. Jadi disini saya benar-benar menghindari adanya keputusan sepihak dengan pemikiran bahwa masalah akan selesai dengan baik apabila diselesaikan dengan kepala banyak dari pada hanya satu kepala.”

(Wawancara dilakukan di Kantor Desa Bendosewu pada hari Rabu, 13 februari 2017 pukul 10:15)

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keputusan yang diambil oleh kepala desa Bendosewu dilakukan secara demokrasi yaitu

melalui musyawarah yang melibatkan aparat desa, masyarakat. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah yang melibatkan RT, RW, pemuka Masyarakat bahkan perwakilan wanita sehingga diharapkan pengambilan keputusan akan sesuai dengan atura yang ada dan sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Dalam setiap pengambilan keputusan kepala desa selalu meminta persetujuan dari masyarakatnya. Pada aspek pengambilan keputusan ini kepala desa Bendosewu menggunakan gaya demokrasi relatif dimana dalam pengambilan keputusan selalu melibatkan masyarakat dan perangkat desa hal itu bisa dilihat dari adanya masukan, kritik dan saran dari masyarakat terkait keputusan itu dan selalu meminta persetujuan dari masyarakat. pada saat pengambilan keputusan ini kepala desa sudah melakukan peranya sebagai pemimpin formal yang memang berada pada puncak organisasi sehingga dia mempunyai wewenang untuk mengambil sebuah keputusan yang sudah dimusyawarahkan bersama.

#### **B. Komunikasi sebagai salah satu bentuk sinergitas Kepala Desa Kepada perangkat desa dan Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat Desa di Desa Bendosewu**

Komunikasi merupakan salah satu aspek pendukung sinergitas bagi sebuah organisasi dalam menjalankan tugas kinerjanya. Karena komunikasi sangat penting dalam berjalanya organisasi, seorang pemimpin pun tak lepas dari cara komunikasinya masing-masing. Komunikasi dapat berpengaruh terhadap efektivitas berjalanya sebuah organisasi. Komunikasi dilakukan oleh kepala desa dengan perangkat desa dan masyarakat umum agar penyampaian informasi dapat

berguna dan bermanfaat bagi masyarakat umum agar penyampaian informasi dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar serta menjadi nilai berarti dalam pembangunan wilayah. Komunikasi yang baik juga dapat membangun sinergitas antar pihak yang terlibat mengenai program pembangunan yang berlangsung.

Seperti yang disampaikan oleh ibu sri unaryani Selaku Kepala Desa Bendosewu:

“memahami mekanisme yang ada, arah komunikasi yang saya lakukan ke perangkat desa ataupun masyarakat yaitu timbal balik/dua arah. Namun sekarang yang lebih diutamakan pengusulan justru dari bawah atau komunikasi seringnya dari pihak kedua atau masyarakat. Komunikasi dua arah ini biasanya terjadi dalam pertemuan atau rapat yang diselenggarakan. Kita sebagai pemerintah di lingkup desa hanya menjembatani keinginan masyarakat yang tertuang dari musyawarah yang sudah dilakukan mulai dari bawah baru disusun skala prioritas. Saya memberi fasilitas kepada masyarakat dalam kegiatan yang dilakukan tidak keluar dari jalur. Pada intinya eranya sekarang masyarakat yang aktif, masyarakat mengusulkan dan desa hanya menjembatani keinginan masyarakat yang tentunya dipilah sesuai dengan skala prioritas”.

(Wawancara dilakukan di Kantor Desa Bendosewu pada hari Rabu, 22 februari pukul 10:15)

Komunikasi yang dilakukan seorang pemimpin memang sangat diperlukan agar berjalanya sinergitas sebuah birokrasi atau pemerintahan dapat berjalan efektif. Cara komunikasi seorang kepala desa yang baik sangat dibutuhkan agar informasi yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya program nanti sesuai dengan apa yang diamanahkan dan apa yang ingin dicapai sebelumnya. Jenis penyampaian informasi yang dilakukan oleh kepala desa akan menunjukkan kepala desa menggunakan gaya otoriter atau demokratis dalam

menyampaikan komunikasinya. Seorang kepala desa harus mampu memberikan informasi atau berkomunikasi dengan baik dan berkualitas agar masyarakat mampu memahami informasi yang disampaikan.

Seperti yang disampaikan oleh bapak ashuri selaku ketua RW 01 Desa

Bendosewu :

“..komunikasi yang dilakukan oleh Kades secara dua arah. Karena kedua pihak saling bertemu dan terjadi interaksi di dalamnya, contohnya saat ada pertemuan atau rapat yang di dalamnya pasti ada komunikasi atau interaksi antara masyarakat dan kepala desa jadi lebih dua arah”.

(Wawancara dilakukan di kediaman Bapak ashuri selaku ketua RW 01 Desa Bendosewu pada hari rabu, 22 februari 2017 pukul 17:00)

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak rosin selaku ketua RW 04

Desa Bendosewu pada hari Kamis, 23 Februari 2017 pukul 18:30)

“cara berkomunikasi ibu Kepala Desa dilakukan secara langsung, contohnya saat ada pertemuan apabila tidak ada halangan Beliau selalu hadir dan menyampaikan secara langsung kepada RT/RW terkait maksud dan tujuan yang ingin Beliau sampaikan. Bila ada kegiatan atau pertemuan-pertemuan ibu Kepala Desa selalu memberikan undangan kepada pihak yang terkait. Dalam diskusi itu pak Kepala Desa melakukan secara langsung tanpa ada perantara yang didalamnya pasti ada komunikasi timbal balik antara masyarakat dan kepala desa”.

(Wawancara dilakukan di kediaman Bapak rosin selaku ketua RW 04 Desa Bendosewu pada hari Kamis, 23 Februari 2017 pukul 19:30)

Hal lain ditambahkan oleh Bapak sutopo selaku BPD desa

Bendosewu:

“mengenai cara komunikasi yang dilakukan Kepala desa saat dikantor dengan perangkat desa sendiri bisa mas lihat bahwa memang ibu lebih mengutamakan adanya rasa kekeluargaan di kantor, yang pada dasarnya disini kita adalah bawahan namun ibu selalu mengutarakan bahwa memang semua diantara kita sama, jadi memang di kantor saat ini nyaman sekali, kita jadi semangat dan termotivasi untuk kerja maksimal untuk sama-sama meningkatkan partisipasi masyarakat”.

(Wawancara dilakukan di kantor Desa Bendosewu pada hari jumat, 24 Februari pukul 10:15)

Hal lain juga ditambahkan oleh ibu sri unaryani selaku kepala desa

Bendosewu:

“...pada dasarnya semua masyarakat desa Bendosewu mempunyai keinginan untuk terlibat namun masih kurangnya kemampuan yang dimiliki masyarakat mulai dari apa informasi terkait pembangunan yang mereka punya, terus prosesnya nanti seperti apa, oleh karena itu memang saya lebih banyak memberikan arahan kepada masyarakat untuk memotivasi masyarakat agar lebih aktif lagi dalam pelaksanaan pembangunan yang ada. Saya sering berkonsultasi dengan pembangunan yang akan dilakukan”.

(Wawancara dilakukan di kantor Desa Bendosewu pada hari jumat, 24 Februari pukul 10:15)

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara diatas, komunikasi yang dilakukan oleh kepala desa dengan cara dua arah. Kepala desa menyampaikan informasi yang ia ketahui dan kepala desa juga memberikan kesempatan untuk masyarakat untuk menanggapi informasi yang sudah disampaikan, sehingga terjadi interaksi antara kedua pihak dalam sebuah forum. Adanya diskusi dalam setiap pertemuan/rapat kerja RT/RW dan kepala dusun untuk membahas program kerja pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Selain diskusi, kepala desa sebagai fasilitator juga memberikan arahan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya agar tidak keluar jalur dan sesuai dengan apa yang diharapkan sebelumnya. Gaya berkomunikasi antara kepala desa dengan masyarakat atau sebaliknya melalui sarana undangan, jadi dapat disimpulkan bahwa gaya komunikasi yang digunakan cenderung dengan gaya konsultatif.

**C. Pemberian Pengawasan oleh Kepala Desa dan perangkat desa Kepada Masyarakat dalam Pembanguna Infrastruktur Desa dan pemberdayaan masyarakat di Desa Bendosewu**

Pengawasan dilakukan untuk mengontrol sejauh mana program yang telah atau akan dilaksanakan, apakah didalam pelaksanaanya sudah berjalan denagn baik atau belum. Berkaitan dengan hal ini kepala desa Bendosewu melakukan tugasnya dalam pengawasan terhadap kegiatan yang berjalan dilakukan dengan langsung dan tidak langsung. Pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan infratraktur desa dan pemberdayaan masyrakat dilakukan dengan terjun ke lapangan langsung dan kadang dengan memerintahkan perangkat desa sebagai penggantinya. Seperti yang diungkapkan oleh ibu sri unaryani selaku Kepala Desa Bendosewu bahwa pengawasan yang dilakukanya yaitu:

“pengawasan yang saya lakukan terhadap kegiatan pembangunan infrastruktur di desa Bendosewu saya lakukan terkadang secara langsung dan tidak langsung. Kemudian pemberdayaan masyarakat seperti pengadaan posyandu balita dan lansia, pelatihan keterampilan serta sarana prasaranan social keagamaan. Pengawasan secara langsung biasanya saya lakukan dengan turun langsung untuk memantau sejauh mana pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut apa sudah berjalan baik atau belum. Kemudian pengawasan tidak langsung yang saya lakukan yaitu dengan melakukan koordinasi dengan pihak RT atau RW dan kepala dusun yang terkait. Dalam artian memanfaatkan koneksi yang ada dengan dibantu oleh BPD dan teman yang lainnya yang dipercaya dan dimintai tolong untuk mengawasi pembangunan dan pemberdayaan yang ada di wilayah kita.

(Wawancara dilakukan di Kantor Desa Bendosewu pada hari jumat, 24 Februari 2017 pukul 10:15)

Hal lain diungkapkan oleh Bapak wasis selaku Kepala dusun bendosewu, Desa Bendosewu :

“pengawasan yang dilakukan oleh ibu Kepala Desa dalam pelaksanaan program pembangunan disini bisa dibilang tidak begitu ketat ya. Dalam pembangunan yang berjalan disini Beliau biasanya hanya memerintahkan salah satu perangkat desa untuk memantau pelaksanaan pembangunan di lapangan”.

(Wawancara dilakukan di kediaman bapak wasis selaku kepala dusun bendosewu Desa Bendosewu pada hari Senin, 25 Februari 2017 pukul 18:20)

Selain itu, Bapak Isnari selaku kepala dusun bakulan, Desa

Bendosewu juga menjelaskan:

“sifat pengawasan yang dilakukan ibu Kepala Desa bisa dibilang longgar Mas, tapi meskipun ibu tidak ada tetap ada perangkat desa yang turun ke lapangan untuk memantau pembangunan yang berlangsung. Ya mungkin itu dipertintahkan oleh Kepala Desa sebagai pengganti beliau jadi tetap ada pengawasan yang jelas dari perangkat desa meskipun ibu kepala desa tidak turun langsung ke lapangan”.

(Wawancara dilakukan di kediaman Bapak Isnari selaku kepala dusun bakulan Desa Bendosewu pada hari Sabtu, 25 Februari 2017 pukul 19:30)

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Supangat selaku kaur umum

Desa Bendosewu :

“...masalah pengawasan semua diserahkan pada pihak yang dipercayakan pada pihak yang diberi tanggungjawab, jadi ibu jarang melakukan pengawasan secara langsung. Terkadang hadir dalam pembangunan untuk memantau tapi terkadang diwakilkan oleh perangkat desa lainnya. Tapi memang sebelumnya kepala desa sudah memberikan arahan terkait pembangunan yang semacam apa yang akan dilakukan”.

(Wawancara dilakukan di kediaman bapak Supangat selaku kaur Desa Bendosewu pada hari Minggu, 26 Februari 2017 pukul 17:00)

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Rudianto selaku Sekretaris

desa Bendosewu:

“dalam pemberian pengawasan biasanya ibu memberikan amanat kepada saya selaku pihak yang berada di bawah struktur kepala desa. Biasanya saya disuruh kepala desa untuk turun ke lapangan, namun juga dalam pemberian wewenang itu beliau melakukannya dengan

baik. Tidak semata-mata secara tegas menyuruh tapi lebih pada melakukan pendekatan dengan baik, sehingga kami sebagai bawahan secara langsung juga merasa nyaman dengan cara yang dilakukan Kepala Desa. Kalau masalah pengawasan yang dilakukan dengan perangkat desa ya meskipun istilahnya beliau tidak mengawasi namun memang kita secara tidak enak apabila ingin bersantai-santai, namun beliau baik kok mas, kalau ada dari kita yang salah Cuma diingatkan pelan-pelan”.

(Wawancara dilakukan di rumah Bapak rudianto pada hari Sabtu, 27 Februari 2017 pukul 16:30)

Selain itu hal serupa juga di tambahkan lagi oleh ibu sri unaryani

selaku kepala desa Bendosewu :

“memang sejauh ini, terkait pengawasan yang saya berikan itu lebih banyak saya lakukan secara tidak langsung mas. Saya memberikan kepercayaan kepada salah satu rekan di kantor atau melalui ketua RW dan kepala dusun masing-masing untuk memantau pembangunan yang berjalan. Dari situ nantinya setiap ketua RW dan kepala dusun memberikan laporan kepada saya terkait pelaksanaan pembangunan misalnya di hari libur dan kemungkinan saya untuk ikut secara langsung dalam pembangunan yang dilaksanakan. Hal ini saya terapkan karena saya yakin bahwa pada dasarnya pembangunan dilakukan untuk dan oleh masyarakat jadi semua pihak pada dasarnya mempunyai wewenang untuk saling mengawasi pembangunan yang berlangsung”.

(Wawancara dilakukan di Kantor Desa Bendosewu pada hari selasa, 28 Februari 2017 pukul 10:15)

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa Bendosewu dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur dilakukan dengan longgar. Pengawasan yang dilakukan lebih cenderung secara tidak langsung dengan melalui pemberian kepercayaan kepada pihak yang terkait. Terkadang ibu kepala desa memang terjun secara langsung namun hal itu jarang dilakukan, kepala desa memang melimpahkan kepercayaan kepada pihak pelaksana, seperti memberikan kepercayaan kepada ketua RW dan kepala dusun masing-masing untuk

mengontrol pembangunan yang ada. Gaya yang dilakukan kepala desa dalam melakukan pengawasan lebih kepada gaya Kemitraan. Hal ini ditunjukkan dari pemberian kepercayaan yang dilimpahkan kepada ketua RW dan perwakilan dari perangkat desa lainnya untuk bersama-sama mengawasi pembangunan yang sedang berlangsung. Dalam hal ini kepala desa juga menghilangkan kesenjangan antara kepala desa dan masyarakat, yang dapat dilihat dari semua masyarakat memiliki hak yang sama untuk mengawasi pembangunan yang sedang berlangsung agar sama-sama mengetahui apa yang kurang dan tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan sebelumnya.

#### **D. Pemberian Motivasi oleh Kepala Desa Kepada Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa serta pemberdayaan masyarakat desa bendosewu**

Keberhasilan berjalanya suatu program atau kegiatan dalam lingkup desa tidak terlepas dari campur tangan kepala desa setempat untuk menggerakkan masyarakat sekitar dalam kegiatan yang dilakukan di Desa Bendosewu. Pemberian motivasi atau dukungan dari Kepala desa kepada masyarakat memerlukan semangat dan kerjasama yang tentunya akan bermanfaat untuk menciptakan kebersamaan dalam kegiatan pembangunan desa, dan antar kepala desa, perangkat desa dan masyarakat saling berkesinambungan yang nantinya diharapkan mampu bekerjasama secara maksimal terhadap program/kegiatan tersebut. Mencapai tujuan yang diharapkan merupakan motivasi dasar masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan infrastruktur yang ada. Seperti yang disampaikan oleh ibu sri unaryani selaku kepala desa Bendosewu :

“motivasi awal yang saya berikan kepada masyarakat desa Bendosewu yaitu menggerakkan dan mendorong masyarakat desa Bendosewu untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan atau program-program yang telah ditetapkan. Tujuannya yang jelas yaitu untuk memajukan desa kita sendiri dengan melakukan pembangunan dan pemberdayaan yang tentunya diharapkan masyarakat”.

(Wawancara dilakukan di kantor desa Bendosewu pada hari Rabu, 01 maret 2017 pukul 10:15)

Lebih lanjut disampaikan oleh ibu sri unaryani selaku Kepala Desa Bendosewu :

“...jika masyarakat sudah tahu tujuan dari pembangunan dan pemberdayaan tersebut, pasti akan muncul motivasi dalam diri mereka masing-masing, karena saya yakin bahwa masyarakat tentunya juga menginginkan lingkungan yang lebih baik lagi dan pembangunan yang lebih maju lagi di desa mereka. Memang tidak semua pembangunan akan tercapai bersamaan dalam waktu dekat, namun dengan adanya niat dan kegigihan dari semua pihak yang ada di desa Bendosewu baik masyarakatnya maupun pemerintah desa saya yakin semua pasti bisa dilalui. Yang penting kami selalu mensosialisasikan terkait dengan pelaksanaan program pembangunan yang akan dilakukan nantinya...melihat dari masyarakat desa Bendosewu sendiri yang pada dasarnya mereka mempunyai kemampuan yang lebih untuk berpartisipasi, namun kurang mau ikut terlibat oleh karena itu saya lakukan dengan turun ke masyarakat langsung”.

(Wawancara dilakukan di kantor desa Bendosewu pada hari Rabu, 01 maret 2017 pukul 10:15)

Penjabaran tujuan dari program yang ingin dicapai merupakan hal utama yang dilakukan kepala desa Bendosewu dalam memotivasi masyarakatnya. hal tersebut ditegaskan oleh kepala desa bahwa jika masyarakat mengetahui tujuan dari pembangunan yang dilakukan, maka secara otomatis akan timbul suatu pemicu untuk melakukan dan mencapainya. Tentunya tujuan yang ingin dicapai dari pembangunan yang dilakukan yaitu untuk lebih mengembangkan desa Bendosewu sendiri dan tentunya yang lebih utama yaitu untuk mensejahterahkan dan mempermudah kegiatan masyarakat sehari-hari.

Motivasi muncul karena ada pemicu untuk seseorang melakukan sesuatu. Pemicu tersebut dapat berasal dari dalam diri masyarakat maupun dari luar diri masyarakat. Motivasi pada dasarnya merupakan suatu proses memberikan sugesti kepada seseorang untuk melakukan apa yang orang lain inginkan. Adanya motivasi yang timbul dalam diri mereka untuk mengerjakan sesuatu secara maksimal. Pentingnya kepala desa memotivasi masyarakat tidak lain yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat disetiap kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan di desa Bendosewu.

Berikut pernyataan yang diungkapkan oleh mas virga selaku masyarakat RW 01 desa Bendosewu:

“dalam memberikan motivasi kepada masyarakat, ibu kepala desa melakukannya dengan menjabarkan tujuan dari kegiatan yang dilakukan lewat ketua RW mas, yang nanti disampaikan oleh masyarakat. ibu selalu menjelaskan pembangunan dilakukan untuk dan oleh masyarakat sendiri, jadi dari situ terpacu untuk terlibat dalam pembangunan yang berjalan. Begitu juga dengan pemberdayaan masyarakat desa sini yang sifatnya lebih ke pembangunan juga mas. (Wawancara dilakukan di kediaman mas virga selaku Masyarakat RW 01 desa Bendosewu pada hari Kamis, 02 Februari 2017 pukul 10:00)

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak ashuri selaku ketua RW 01 desa Bendosewu:

“sejauh ini, pemberian motivasi dari kepala desa sudah tampak baik mas, hal itu juga bisa dilihat dari partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang ada. Terkadang juga sekaligus mengawasi berjalanya pembangunan beliau juga ikut menghadiri pembangunan itu, yang secara tidak langsung memotivasi masyarakat untuk terlibat juga dalam pelaksanaannya”. (Wawancara dilakukan di kediaman Bapak ashuri selaku ketua RW 01 Desa Bendosewu pada hari Kamis, 02 Februari 2017 pukul 18:30)

Hal lain ditambahkan oleh bapak rudianto selaku Sekretaris desa

Bendosewu:

“di kantor sendiri kepala desa juga selalu memotivasi kita(perangkat desa) untuk bekerja sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. beliau selalu menuturkan bahwa desa akan baik dan program yang sudah ada akan baik apabila kita sebagai pemerintah yang ada di desa bekerja sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu yang secara tidak langsung menjadi motivasi kita mas”.

(wawancara dilakukan dirumah bapak rudianto pada hari jumat, 03 maret 2017 pukul 16:30)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh bapak budi siswanto selaku

masyarakat RW 04 desa Bendosewu :

“saat perkumpulan atau rapat yang melibatkan kepala dusun, ketua RW dan perwakilan masyarakat di akhir rapat ibu kepala desa selalu memberikan motivasi untuk sama-sama membangun desa agar lebih baik lagi. Dan nantinya dari situ ketua RW yang menyampaikan kepada masyarakatnya untuk ikut dalam pembangunan yang berlangsung”.

(Wawancara dilakukan di kediaman Bapak budi siswanto selaku masyarakat RW 04 pada hari sabtu, 04 maret 2017 pukul 18:40)

Dari beberapa pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa motivasi yang dilakukan kepala desa Bendosewu kepada masyarakat yaitu dengan menetapkan dan memaparkan tujuan akhir dari pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan. Membangun komitmen yang kuat dengan masyarakat untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan yang diharapkan. Dengan adanya tujuan yang jelas dari program yang dilakukan hal itu yang akan menjadi sumber motivasi masyarakat untuk ikut dalam proses pembangunan yang akan dilaksanakan.

### **E. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur serta pemberdayaan di Desa Bendosewu Partisipasi dalam menerima dan Memberikan Informasi**

Pembangunan suatu wilayah tidak akan berhasil jika tidak ada partisipasi masyarakat, begitu juga dengan pemberdayaan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur yang ada sangat berarti bagi hasil pembangunan nantinya. Pada uraian ini, dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan di desa Bendosewu masyarakat turut berpartisipasi dalam proses didalamnya. Pada pelaksanaan kegiatan, partisipasi masyarakat dapat terlihat dari kontribusi yang diberikan saat proses pembangunan dan pemberdayaan yang ada. Pada kenyataannya, tidak semua tahapan atau bentuk partisipasi dapat diikuti oleh masyarakat.

#### **1). Partisipasi dalam Menerima dan memberikan Informasi**

Informasi merupakan hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Informasi merupakan kebutuhan dari masyarakat. Kegiatan yang dilakukan masyarakat sehari-hari tidak terlepas dari memberikan ataupun menerima informasi. Dengan adanya informasi masyarakat dapat mengetahui apa saja yang harus dilakukan. Hal ini juga terkait dengan tahapan pemberian atau penerimaan informasi yang terkait dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa Bendosewu. Informasi yang diterima dan diberikan dari, oleh, dan kepada masyarakat lainnya tentunya memberikan pengaruh dan peranan dari masyarakat

itu sendiri pada berlangsungnya pembangunan infrastruktur yang ada di desa Bendosewu.

Berikut merupakan pernyataan dari bapak wasis selaku kepala dusun bendosewu Desa Bendosewu:

“biasanya ibu kepala desa menyampaikan info-info tentang kegiatan pembangunan atau prosedur dan sebagainya. Setelah itu saya sampaikan kepada ketua RW di dusun saya terkait dengan apa yang disampaikan oleh ibu kepala desa. Jadi jelas mas, ibu kepala desa menyampaikan informasi ke kepala dusun, saya menyampaikan kepada ketua RW yang kemudian menyampaikan informasi tersebut ke masyarakat dan masyarakat yang menerima informasi itu..”  
(Wawancara dilakukan di kediaman Bapak wasis selaku kepala dusun bendosewu, Desa Bendosewu pada hari minggu, 05 maret 2017 pukul 18.30)

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak ashuri selaku ketua RW

01 desa Bendosewu :

“...dalam memberikan informasi memang ada. Saya selaku ketua RW disini memberikan informasi kepada masyarakat jika ada pemberitahuan dari kantor desa bahwa ada kegiatan kerja bakti atau proyek terkait pembangunan infrastruktur yang berasal dari pusat. Kemudian kalau dalam hal menerima informasi dari mulut ke mulut atau melalui pertemuan masyarakat, bahkan bisa langsung mendatangi saya atau pihak lain yang berwenang”.  
(Wawancara dilakukan di kediaman bapak ashuri selaku ketua RW 01 desa Bendosewu pada hari Senin, 06 maret 2017 pukul 18:20)

Selanjutnya hal yang sama juga disampaikan oleh ibu sri unaryani selaku kepala desa Bendosewu:

“...proses menerima dan memberikan informasi itu terjadi secara spontan disini mas, karena memang saya mengharuskan semua masyarakat aktif dalam setiap kegiatan yang ada, baik mengenai pembangunan infrastruktur ataupun kegiatan lainnya. Karena dengan adanya komunikasi masyarakat akan saling berinteraksi dan saling memberikan informasi dan saling membantu satu dengan lainnya, jadi tidak ada masyarakat yang pasif..”  
(Wawancara dilakukan di Kantor desa Bendosewu pada hari selasa, 07 maret pukul 10:15)

Dari beberapa hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa memang ada keterlibatan masyarakat dalam menerima dan memberikan informasi dalam proses pembangunan dan pemberdayaan di desa Bendosewu yang terjadi antar masyarakat. Pemberian informasi disini lebih banyak berasal dari kepala desa, sebab kepala desa merupakan jembatan atau sebagai informan masyarakat dari pihak pemerintah daerah. Informasi diberikan oleh kepala desa melalui kepala dusun kemudian disampaikan ke ketua RW yang nantinya akan diteruskan oleh ketua RW kepada masyarakat.

**F. Partisipasi dalam Memberikan Tanggapan dan Saran Terhadap Informasi yang Diterima, baik Bermaksud Menolak maupun yang Menerima**

Informasi yang akan maupun yang sudah disampaikan baik melalui kepala desa maupun perangkat desa dan RT atau RW, seharusnya memang harus diberi tanggapan oleh masyarakat. Informasi yang diberikan kepada masyarakat dapat berupa sebuah keputusan, berita, undangan dan lainnya. Secara langsung, partisipasi disini memberikan ruang kepada masyarakat supaya dapat berperan dan berkontribusi secara langsung dalam proses pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan yang ada di desa Bendosewu. Berikut adalah beberapa hasil wawancara yang di dalamnya menyajikan terlibat atau tidaknya masyarakat dalam memberikan saran dan tanggapan dari informasi yang sudah mereka terima.

Berikut penuturan dari Bapak Isnarii selaku kepala dusun bakulan desa Bendosewu:

“..masyarakat kalau dalam hal penyampaian pendapat, saran, aspirasi dan lain sebagainya muncul saat perencanaan pembangunan mas. Dimana saat forum rapat gitu masyarakat sering menyampaikan saran, pendapat dan lainya terhadap informasi yang diterimanya. Kalau dalam hal ini pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ya, misalnya ibu kepala desa memberikan informasi tentang kegiatan pembangunan nantinya disitu masyarakat selalu mananggapi, apakah mereka menerima, menolak atau memberikan tanggapan terhadap informasi itu).

(Wawancara dilakukan di kediaman bapak isnari selaku kepala dusun bakulan Desa Bendosewu pada hari Sabtu, 11 bakulan 2017 pukul 17:00)

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak budi siswanto selaku masyarakat RW 04 desa Bendosewu :

“..disini kami warga RW 04 menanggapi dan sangat setuju dengan rencana perbaikan jalan menuju ke area sawah dan pemberdayaan masyarakat teutama untuk masjid yang kata ibu kades sudah dijalankan, tapi sampai saat ini belum selesai...”

(Wawancara dilakukan di kediaman bapak budi siswanto selaku masyarakat RW 04 pada hari minggu, 12 maret 2017 pukul 18:40)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan dari masyarakat dalam menangani semua informasi yang diterimanya baik dari kepala desa secara langsung maupun tidak langsung bermaksud untuk menerima ataupun menolaknya. Dalam beberapa hasil wawancara yang telah dilakukan, sejauh ini masyarakat menerima dari informasi tentang pembangunan infrasrtuktur serta pemberdayaan masyarakat yang disampaikan oleh bapak kepala desa salah satu contohnya tentang rencana pembangunan dan pemberdyaan yang akan dilakukan dibeberapa wilayah. Sebab pada dasarnya hal itu juga dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar. Jadi adanya keterlibatan masyarakat dalam memberikan tanggapan terkait pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat desa di desa Bendosewu lebih dalam hal itu pasti

sudah ada perumusan bersama orang-orang yang terkait tentang prioritas mana yang akan dilakukan dan pastinya memohon masukan dan persetujuan dari masyarakat juga.

**G. Partisipasi dalam Bentuk Perencanaan pembangunan dan pemberdayaan, termasuk Pengambilan Keputusan**

Dalam sebuah pembangunan dan pemberdayaan, masyarakat mempunyai hak untuk terlibat didalamnya baik dalam perencanaan, perumusan sampai pada pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat itu merupakan salah satu ciri dari berlangsungnya demokrasi. Berikut ini adalah beberapa yang dapat menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat di desa Bendosewu yang dinyatakan oleh ibu sri unaryani selaku Kepala Desa Bendosewu;

“dalam perencanaan, perumusan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan, kita selalu melibatkan masyarakat di dalamnya. Kita biasanya melakukan rapat terlebih dahulu lalu nanti didalamnya merumuskan apa yang diinginkan masyarakat”  
(Wawancara dilakukan di kantor Desa Bendosewu pada hari Rabu, 15 maret pukul 10:15)

Hal yang serupa disampaikan oleh bapak sutopo selaku BPD desa

Bendosewu:

“sejauh ini dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa. Kita selalu dilibatkan didalamnya. Pengambilan keputusan sepenuhnya ada ditangan kepala desa, namun kita selalu dilibatkan dalam perencanaan dan perumusanya, dan pak kepala desa selalu minta persetujuan dari kita juga”.  
(Wawancara dilakukan di kediaman Bapak sutopo selaku ketua BPD Desa Bendosewu pada Kamis, 16 maret 2017 pukul 18:30)

Selanjutnya hal yang sama ditambahkan oleh bapak supangat selaku kepala Kaur umum Desa Bendosewu:

“...kita biasanya berkumpul dalam rapat lalu satu sama lain mengutarakan keinginan pembangunan wilayahnya seperti apa, nanti didalamnya ada diskusi. Membuat perencanaan pembangunan desa seperti apa yang diinginkan masyarakat. Lalu ibu kepala desalah yang memutuskan tapi dengan persetujuan kita juga”.  
(Wawancara dilakukan di kediaman bapak supangat selaku kepala Kaur desa Bendosewu pada hari jumat, 17 maret 2017 pukul 18:20)

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi perangkat desa serta masyarakat dalam perencanaan, perumusan dan pengambilan keputusan sudah tampak di desa Bendosewu. Masyarakat dilibatkan dalam proses ini untuk mengurangi adanya keputusan sepihak oleh kepala desa saja. Hal tersebut dilakukan agar pembangunan dan pemberdayaan yang ada dapat sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat.

#### **H. Partisipasi dalam Bentuk Pelaksanaan Operasional Pembangunan dan pemberdayaan**

Dalam setiap kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang ada masyarakat berhak untuk berperan serta di dalamnya tak terkecuali desa Bendosewu. Partisipasi yang dilakukan masyarakat merupakan kerja sama untuk saling membangun satu sama lainnya demi mencapai tujuan bersama. Berikut adalah penuturan dari kepala desa mengenai keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan:

“tentunya dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan sangat dibutuhkan adanya partisipasi masyarakat secara langsung. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa

serta pemberdayaan sendiri terkadang kita melibatkan masyarakat luar atau yang bisa disebut sebagai tukang untuk melaksanakannya, masyarakat sekitar hanya membantu hal kecil lainnya. Jadi kita tidak menutup kemungkinan mengambil tukang dari luar desa kita untuk pelaksanaan pembangunan yang ada. Sejauh pengamatan saya saat ini, pada dasarnya partisipasi masyarakat sudah lumayan baik mulai dari tahap perencanaan dan seterusnya. Namun terkadang saat pelaksanaan pembangunannya yang diharapkan dapat banyak terlibat justru keikutsertaan masyarakat kurang. Ya mungkin hal itu dikarenakan masyarakat mempunyai kepentingan sendiri sehingga tidak bisa ikut langsung dalam pembangunan yang ada”.

(Wawancara dilakukan di Kantor desa Bendosewu pada hari senin, 20 maret pukul 10:15)

Hal serupa juga disampaikan oleh mas virga selaku masyarakat RW

01 desa Bendosewu:

“...terkadang saat pelaksanaan memang sedikit masyarakat yang terlibat mas, hal ini mungkin dikarenakan waktu yang tidak tepat sehingga sedikit masyarakat yang ikut karena lebih mengutamakan kepentingan mereka masing-masing”.

(Wawancara dilakukan di kediaman mas virga selaku masyarakat RW 01 pada hari senin, 20 maret 2017 pukul 17:10)

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak budi siswanto selaku

masyarakat RW 04 desa Bendosewu:

“..untuk beberapa kali juga saya ikut langsung pelaksanaan daerah sekitar saya mas, ya kadang hal itu karena saya punya urusan yang lebih penting. Dan juga masyarakat lainnya jarang ada yang ikut jadi akhirnya malas”.

Selain itu ditambahkan lagi oleh penuturan bapak ashuri selaku ketua

RW 01 desa Bendosewu:

“sebagian besar proyek pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan yang sifatnya juga pembangunan dilakukan oleh orang luar dalam artian bukan masyarakat desa Bendosewu sendiri. Hal itu terkadang yang membuat masyarakat kurang berpartisipasi di dalamnya karena mereka berfikir semua sudah bisa dilakukan oleh tukang itu sendiri”.

(Wawancara dilakukan di kediaman bapak ashuri selaku ketua RW 01 desa Bendosewu pada hari selasa, 21 maret 2017 pukul 18:20)



**Gambar 4.5 keterlibatan masyarakat dalam perbaikan jalan**  
Sumber : dokumen Kepala Desa Bendosewu

Dari beberapa hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam bentuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan di desa Bendosewu sudah tampak namun masi dinilai kurang. Hal itu terjadi karena beberapa faktor, contohnya ketidak tepatan pembangunan, contoh pelaksanaan pembangunan pada hari kerja sehingga masyarakat tidak bisa ikut karena mereka punya pekerjaan sendiri-sendiri. Selain itu karena terkadang beberapa proyek pembangunan dilakukan oleh tukang yang berasal dari luar desa Bendosewu, sehingga masyarakat menjadi enggan untuk ikut dalam pelaksanaan itu. Padahal pembangunan yang baik adalah pembangunan yang dilakukan dari, untuk dan oleh masyarakat. Keterlibatan masyarakat pada pembangunan sangat penting. Hal itu agar pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan dapat sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat sehingga dapat tepat sasaran. Dengan

masyarakat sendiri yang melakukan kemungkinan untuk tidak tepat sasaran dapat berkurang.

### **I. Partisipasi dalam Menerima Hasil Pembangunan dan Pemberdayaan**

Segala usaha pembangunan dan pemberdayaan yang telah dilaksanakan diharapkan akan bermanfaat dan mampu menjangkau masyarakat secara umum, dengan demikian masyarakat juga akan terlibat dalam merasakan perbedaan dengan adanya pembangunan dan pemberdayaan yang telah dilakukan sebelum adanya pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan itu. Hasil itu juga untuk warga desa Bendosewu yang tidak memungkiri juga menerima hasil baik positif maupun negatif.

Berikut penuturan mas virga selaku masyarakat RW 01 Desa Bendosewu :

“...hasil pembangunan infrastruktur jelas sangat dirasakan sama masyarakat sini mas, salah satu contohnya perbaikan atau pemavingan jalan yang ada di RW ini sangat bermanfaat jadi jalan nggak becek, saat hujan nggak banjir dan kemudian pemberdayaan di bidang agama yaitu adanya pembangunan masjid, jadi di lingkungan sini akhirnya ada masjid ...”

(wawancara dilakukan dikediaman mas virga pada hari minggu, 19 maret 2017 pukul 17.10)

Senada dengan pernyataan itu, Bapak rosin selaku Ketua RW 04 Desa Bendosewu juga menyampaikan :

“...secara umum, masyarakat sudah menerima hasil pembangunan infrastruktur yang ada. Salah satunya disini dari pembangunan jalan menuju area persawahan. Hal ini sangat mempermudah warga sini dalam melaksanakan pekerjaan mereka sehari-hari khususnya disini yang bermata pencarian sebagai petani. Sebelumnya akses menuju sawah sangat susah dan sempit, setelah pembangunan ini kita semakin mudah dalam lalu lalang ke area sawah, bagi yang ingin mengangkut

padi dan lainnya jadi mudah sekarang karena jalannya sudah luas dan enak...”

(Wawancara dilakukan di kediaman Bapak rosin selaku ketua RW 04 Desa Bendosewu pada hari minggu, 19 maret 2017 pukul 19.00)

Dari dua hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil pembangunan serta pemberdayaan yang dilakukan sudah dirasakan oleh masyarakat. Hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan ini sangat diterima dan bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Manfaat itu dapat dirasakan seperti setelah adanya pembangunan jalan menuju ke daerah sawah masyarakat khususnya petani lebih mudah untuk melakukan kegiatannya dibandingkan dengan sebelumnya. Selain itu contoh lain adalah dengan adanya pemavingan jalan hal itu juga sangat bermanfaat karena yang sebelumnya jalanan menjadi becek setelah hujan, saat ini menjadi tidak dan pemberdayaan desa seperti adanya masjid serta posyandu balita dan lansia yang sudah terealisasikan. Secara keseluruhan bahwa hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan melibatkan partisipasi dari masyarakat, yang mana hasil itu dapat bermanfaat bagi masyarakat, yang mana hasil itu dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Beberapa hasil pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan yang sudah disebutkan diatas, secara keseluruhan sangat dirasakan dan diterima oleh masyarakat Desa Bendosewu. Semua hasil itu sangat bermanfaat bagi kegiatan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa masyarakat Desa Bendosewu terlibat dalam menerima hasil pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan tersebut.

## **J. Partisipasi dalam Menilai Hasil Pembangunan**

Dari semua bentuk pembangunan dan pemberdayaan yang telah dilakukan, alangkah lebih baiknya jika diberikan penilaian oleh masyarakat tentang baik atau buruknya. Sebab dengan adanya penilaian dari masyarakat itu mendapat perhatian atas kekurangan dan dampak yang ditimbulkan. Bukan hanya sekedar untuk memberikan perhatian saja, namun penilaian juga diharapkan dapat digunakan untuk bahan evaluasi atau perbaikan terhadap pembangunan yang sudah dilakukan agar kedepannya dapat diperbaiki lagi, dan memberikan manfaat dan nilai guna untuk masyarakat yang lebih lagi.

Berikut adalah data yang diperoleh peneliti terkait dengan penilaian yang diberikan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan yang sudah dilakukan di Desa Bendosewu, yang akan disampaikan oleh ibu sri unaryani selaku Kepala Desa Bendosewu :

“...seluruh masyarakat mempunyai hak yang sama dalam menilai hasil dari pembangunan dan pemberdayaan yang sudah berlangsung berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Dengan adanya penilaian itu diharapkan masyarakat mampu memberikan kontribusi untuk mendukung serta mengevaluasi hasil kerja yang telah tercapai bersama ini, agar kedepannya lebih baik lagi...”  
(Wawancara dilakukan di Kantor Desa Bendosewu pada hari senin, 20 maret 2017 pukul 10.15)

Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa kepala desa Bendosewu memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam hal menilai atau mengoreksi pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan yang dilaksanakan. Dari keterlibatan masyarakat dalam menilai dan mengoreksi pembangunan dan pemberdayaan itu diharapkan untuk kedepannya mampu mengoreksi segala kekurangan dan kelebihan yang ada untuk perbaikan

kedepannya agar fasilitas atau hasil pembangunan dan pemberdayaan yang lebih baik dan bermanfaat lebih besar lagi untuk masyarakat.

Maka dari itu, terkait dengan hak yang dimiliki masyarakat untuk menilai pembangunan dan pemberdayaan yang telah dilakukan, kepala desa sangat mengharapkan kontribusi dari masyarakat untuk terus meningkatkan kerjasama untuk memberikan manfaat dan nilai guna bagi pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di Desa Bendosewu agar lebih baik lagi. Apresiasi untuk berhak menilai hasil pembangunan dan pemberdayaan yang sudah dicapai disampaikan oleh Ibu khotimah selaku masyarakat RW 2 Desa Bendosewu, yaitu sebagai berikut :

“...beliau (ibu kepala desa) memang selalu membuka jendela untuk masyarakat menilai atau menanggapi hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukannya untuk memajukan Desa Bendosewu. Sejauh ini pembangunan dan pemberdayaan yang telah dilakukan dinilai cukup baik daripada tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan kepemimpinan sebelumnya pembangunan infrastruktur desa Bendosewu saat ini lebih banyak dan merata dari pada sebelumnya, serta pemberdayaan masyarakat yang lebih mementingkan kebutuhan masyarakat saat ini. Meskipun memang masih ada permasalahan dalam proses pembangunannya, tapi kalau dilihat hasilnya bisa dinilai bagus mas saat ini. Terkait dengan pembangunan infrastruktur sini mungkin kedepannya bisa terus ditingkatkan lagi...”

(Wawancara dilakukan dikediaman Ibu khotimah selaku Masyarakat RW 2 Desa Bendosewu pada hari selasa, 21 maret 2017 pukul 10.00)

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak tabri selaku ketua RW 06

Desa Bendosewu:

“...ibu kepala desa sejauh ini selalu meminta masyarakat untuk tidak segan memberikan penilaian terhadap kinerja, usaha serta hasil pembangunan serta pemberdayaan yang sudah dicapai bersama, dan menurut saya sejauh ini masyarakat cukup dilibatkan untuk bersama-sama menilai apakah hasil pembangunan yang dilakukan sudah sesuai dan memuaskan masyarakat, berdampak dan bermanfaat bagi

masyarakat atau justru malah merugikan masyarakat begitu juga dengan hasil pemberdayaannya. Semua itu sangat berguna untuk kemajuan desa Bendosewu sendiri dan semua juga tergantung pada penilaian masyarakat dan pribadi masing-masing. Kalau tidak ada penilaian pembangunan dan pemberdayaan akan berjalan datar...”  
(Wawancara dilakukan di kediaman bapak tabri selaku ketua RW 06 desa Bendosewu pada hari rabu, 22 maret 2017 pukul 18.20)

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa, dalam menilai sebuah hasil pembangunan dan pemberdayaan diperlukan keterlibatan dari masyarakat. Adanya keterlibatan masyarakat dalam menilai pembangunan yang sudah ada juga berdampak bagi kemajuan desa Bendosewu sendiri. Hal itu menandakan bahwa dalam menilai semua itu. Dan terjadi di desa Bendosewu sendiri ibu kepala desa sudah membuka jendela untuk masyarakat menilai bagaimana pembangunan dan pemberdayaan yang sudah dicapai bersama-sama ini. Hal itu diharapkan nantinya akan berdampak atau bermanfaat bagi kemajuan disana sendiri yang diharapkan dapat lebih baik lagi dari sebelumnya. Dengan adanya penilaian dari masyarakat secara langsung, dari sana dapat terlihat apa yang kuang sesuai dan mana yang perlu diperbaiki lagi untuk pembangunan dan pemberdayaan kedepanya agar pembangunan dan pemberdayaan tidak berhenti atau lebih baik kedepanya.

#### **4.4 Hasil Pembangunan Infrastruktur serta pemberdayaan Yang Telah Dicapai Kepemimpinan Kepala Desa Bendosewu**

Hasil pembangunan dan pemberdayaan merupakan pencapaian dari apa yang telah direncanakan. Selama kepemimpinan kepala desa sejak periode 2015 sampai sekarang, hasil pembangunan infrastruktur sudah mulai berkembang pesat

dan merata di seluruh wilayah desa. Begitu juga dengan hasil pemberdayaan masyarakat desa yang lebih melihat kebutuhan masyarakatnya. Pencapaian dari hasil pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan yang dilakukan kepala desa beserta perangkat desa dengan masyarakat secara bersamaan merupakan hal yang patut dihargai dan diapresiasi, karena hasil yang diperoleh merupakan tanggungjawab yang sudah diselesaikan bersama. Berikut adalah penuturan mas virga selaku masyarakat RW 01 Desa Bendosewu:

“..keberhasilan ibu kepala desa dalam pembangunan infrastruktur saat ini bisa salah satunya yaitu perbaikan jalan yang sudah terealisasi diseluruh jalan lingkungan yang ada di desa Bendosewu. Menurut saya hal ini sangat bermanfaat dan diharapkan pembangunan kedepannya bisa lebih luas di aspek lainnya. Yang dulunya masih banyak jalan-jalan yang rusak dan berlubang saat ini semua sudah diatasi, dan sampai saat ini masih belum ada masalah lagi sehingga keluhan masyarakat tentang jalan yang masih rusak sudah terselesaikan. Contoh di RW 01 sini sejak perbaikan jalan yang dilakukan sekitar pertengahan tahun kemaren sampai saat ini jalanan masih dalam kondisi baik ya mungkin kualitasnya juga baik”.

(Wawancara dilakukan dikediaman mas virga selaku masyarakat RW 01 pada hari kamis, 23 maret 2017 pukul 18:40)

Kepala desa Bendosewu juga menambahkan tentang perbaikan jalan yang dilakukan di desa Bendosewu, berikut pernyataanya:

“..hal pertama terkait pembangunan infrastruktur yang pertama dilakukan sejak kepemimpinan saya memang dalam pembangunan atau perbaikan jalan yang rusak, dan alhamdulillah saat ini perbaikan jalan lingkungan yang ada di desa Bendosewu sudah terlaksana di seluruh wilayah Bendosewu. Bisa mas lihat sendiri nantinya, disemua jalan lingkungan sudah diaspal bahkan ada sebagian yang beraspal yang alhamdulillah sampai saat ini masih dalam kondisi baik. Sehingga diharapkan kedepannya nanti pembangunan bisa difokuskan atau lebih berkembang di sektor lainnya.

(Wawancara dilakukan di Kantor desa Bendosewu pada hari jumat, 24 maret pukul 10:15)



**Gambar 4.6 salah satu jalan yang diperbaiki di RW 01 Desa Bendosewu**  
Sumber : Dokumen kepala desa

Selain perbaikan jalan, hasil pembangunan infrastruktur lainnya yang tercapai selama kepemimpinan kepala desa Bendosewu saat ini yaitu Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PPJU). Hal tersebut dituturkan oleh Bapak tabri selaku ketua RW 06 desa Bendosewu. Berikut penuturanya:

“...bisa dilihat saat ini sepanjang jalan yang mengelilingi desa Bendosewu sudah terpasang lampu-lampu juga. Tujuannya sih yang jelas sebagai penerangan jalan di malam hari, selain itu juga untuk memperindah, dengan adanya lampu-lampu disepanjang jalan di malam hari desa kita terlihat terang, indah dan juga tentunya untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya kecelakaan karena jalan yang gelap”.

(Wawancara dilakukan di kediaman Bapak tabri selaku ketua RW 06 desa Bendosewu pada hari Sabtu, 25 maret 2017 pukul 17.00)

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu khotimah selaku Masyarakat

RW 06 desa Bendosewu:

“dengan adanya pengadaan penerangan disepanjang jalan di desa Bendosewu sini, sangat bermanfaat mas. Saat ini desa kita jadi lebih kelihatan hidup diwaktu malam hari dari pada sebelumnya. Lebih

terang dan siapa yang nggak senang punya wilayah yang lebih baik lagi mas..”.

(Wawancara dilakukan di kediaman Ibu khotimah selaku Masyarakat RW 06 desa Bendosewu pada hari Minggu, 26 maret 2017 pukul 10:00)

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu sri unaryani, kepala desa Bendosewu juga menambahkan tentang pengadaan penerangan jalan ini, berikut pernyataanya:

“pengadaan penerangan jalan umum (PPJU) ini merupakan inovasi yang saya lakukan dengan masyarakat sekitar. PPJU ini dilakukan di seluruh lingkaran desa Bendosewu, dan Alhamdulillah saat ini sudah terealisasi yang tentunya hal ini tercapai berkat sinergitas saya dengan perangkat desa dan partisipasi masyarakat sekitar yang diharapkan mampu lebih memajukan desa Bendosewu lagi”

(Wawancara dilakukan di kantor desa Bendosewu pada hari Rabu, 29 maret pukul 10:15)



**Gambar 4.7 Pengadaan Penerangan Jalan Umum**

Sumber : Dokumen Peneliti

Selain itu, pembangunan infrastruktur lainnya yang sudah tercapai selama kepemimpinan kepala desa Bendosewu yaitu pembangunan Jembatan di beberapa wilayah yang menghubungkan jalan dengan area persawahan. Seperti yang

disampaikan oleh bapak rosin selaku RW 04 desa Bendosewu, berikut penuturanya:

“..alhamdulillah di RW ini sudah terealisasi jembatan yang menuju ke area persawahan, sebelumnya warga khususnya petani kesusahan untuk akses ke sawah sekarang dengan dibangunnya jembatan ini semuanya jadi lebih mudah mas.”

(Wawancara dilakukan di kediaman bapak rosin selaku ketua RW 04 desa Bendosewu pada hari kamis, 30 maret 2017 pukul 18:20)

Hal serupa juga disampaikan oleh bapak budi siswanto selaku masyarakat RW 04 desa Bendosewu:

“adanya pembangunan jembatan ini sangat memudahkan masyarakat untuk akses ke persawahan mas. Sekarang petani dimudahkan, yang dulunya apabila hasil pertanian melalui sungai, sekarang lebih mudah ada jembatan ini”.

(Wawancara dilakukan di kediaman bapak budi siswanto selaku masyarakat RW 04 desa Bendosewu pada hari jumat, 31 maret 2017 pukul 10:00)



**Gambar 4.8 salah satu hasil Pembangunan Jembatan di RW 06 Desa Bendosewu**

Sumber : Dokumen Peneliti

Selain itu, dari segi pemberdayaan masyarakat desa yang sudah terealisasi berupa masjid sebagai sarana prasaranan social keagamaan dan posyandu bagi

balita dan lansia masyarakat desa bendosewu yang sudah tercapai selama kepemimpinan kepala desa Bendosewu. Seperti yang disampaikan oleh bapak supangat selaku kepala kaur umum desa Bendosewu, berikut penuturanya:

“adanya pembangunan masjid sebagai pemberdayaan masyarakat desa di bidang keagamaan membuat desa bendosewu semakin maju terutama di dusun bendorejo, walaupun ada masalah yaitu tidak ada kepala dusun nya, tetapi keluhan masyarakat bisa di tamping oleh kepala desa yang disampaikan masyarakat desa melalui ketua rw tersebut yang di teruskan ke saya sebagai kaur umum kemudian saya menyampaikan kepada kepala desa dan dibahas di rapat RPJMdes periode 2015-2020. Masjid ini sangat berguna untuk dusun bendorejo yang tidak ada masjid Selma ini hanya ada mushola saja. Kemudian pemberdayaan yang sudah terealisasi adalah posyandu balita dan lansia yang sudah dibahas di RPJMdes juga, desa bendosewu saat ini sudah memiliki posyandu balita dan lansia”.

(Wawancara dilakukan dikediaman bapak supangat selaku kepala kaur umum desa Bendosewu pada hari sabtu, 01 april 2017 pukul 10:00)



**Gambar 4.9** salah satu hasil Pembangunan masjid di Desa Bendosewu  
Sumber : Dokumen Peneliti

Secara keseluruhan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai saat kepemimpinan kepala desa Bendosewu yaitu perbaikan jalan atau pengaspalan yang sudah terealisasi diseluru jalan lingkungan yang ada di Bendosewu,

Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PPJU) dan pembangunan Jembatan serta di bidang pemberdayaan sudah terealisasi berupa masjid serta posyandu balita dan lansia. Secara keseluruhan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat yang sudah tercapai ini pada dasarnya juga merupakan kemauan dari masyarakat sendiri. Masyarakatlah yang menentukan pembangunan dan pemberdayaan apa yang ingin dicapai, dan kemudian kepala desa menentukan pembangunan mana yang lebih didahulukan sesuai dengan prioritas mana yang lebih didahulukan.

#### **4.5 Pembahasan Hasil Penelitian**

##### **4.5.1 Kemitraan Kepala Desa Dengan Perangkat Desa Bendosewu Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Desa**

Dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan di wilayah desa, hal yang menjadi perhatian utama yaitu kepemimpinan dari seorang kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya dalam pembahasan ini yaitu masyarakat desa Bendosewu. Sebab, dalam pelaksanaan setiap kinerja itu. Sebagai seorang pemimpin di desa, kepala desa dituntut untuk mempunyai sikap tanggap akan keadaan di wilayahnya, oleh karena itu setiap perbuatan yang dilakukan oleh kepala desa selalu mendapat respon di masyarakat.

Dalam sebuah desa tentunya terdapat masyarakat dengan model yang beragam, oleh karena itu untuk menghadapinya dibutuhkan cara yang berbeda-beda untuk menggandeng masyarakat agar berpartisipasi dalam proses

pembangunan yang ada. Tidak selamanya seorang pemimpin menggunakan satu model gaya kepemimpinan saja. Semua hal itu harus dilihat dari keadaan wilayah dan masyarakat yang ada, sehingga gaya kepemimpinan yang digunakan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dan memajukan wilayah itu sendiri. Apabila seorang pemimpin bertindak secara personal maka hal itu akan menimbulkan konflik antara pemimpin dan Masyarakat. Seorang pemimpin khususnya di sini kepala desa, diharapkan mampu melihat situasi dan kondisi yang terjadi di wilayah yang memungkinkan adanya partisipasi dari masyarakat. karena seorang pemimpin membutuhkan masyarakat dan begitupun sebaliknya masyarakat juga membutuhkan pemimpin.

Sejauh ini Kepala Desa Bendosewu sebagai seorang pemimpin formal di desa Bendosewu berusaha memahami semua perbedaan karakter yang ada di masyarakat. Sebelum mencapai tujuan kepala desa yaitu untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat desa Bendosewu sendiri, yang dilakukan oleh kepala desa Tamabakan dengan menguatkan kinerja dari perangkat desanya terlebih dahulu. Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi yang dilakukan menunjukkan bahwa memang dalam pelaksanaan kinerja sehari-hari, yang dilakukan oleh kepala desa Bendosewu lebih mengutamakan sistem kekeluargaan. Dengan menciptakan keadaan yang harmonis, dengan kekeluargaan tinggi diharapkan perangkat desa merasa nyaman dengan pekerjaan mereka, sehingga tujuan dari pemerintah desa yaitu untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan dapat segera tercapai dengan kuat dengan kompaknya pemerintah desa sendiri.

Dinamika masyarakat yang beaneekaragam di sini mengharuskan kepala desa Bendosewu untuk mampu melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan yang ada. Partisipasi masyarakat merupakan hal yang terpenting dalam berhasil atau tidaknya pembangunan yang dilakukan. Seperti yang dijelaskan oleh Coyners (1991:154-155) salah satu petingnya partisipasi masyarakat yaitu "masyarakat akan percaya dengan program pembangunan apabila mereka terlibat langsung dalam proses pembangunan itu juga akan tumbuh rasa memiliki terhadap proyek pembangunan dan pemberdayaan tersebut".

Dengan adanya partisipasi dari masyarakat secara langsung, masyarakat dapat menilai sendiri bagaimana pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan apakah sudah baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau belum. Selain itu, dengan partisipasi masyarakat secara langsung masyarakat juga nantinya dapat merasakan dan menilai sendiri dampak dari pembangunan dan pemberdayaan yang telah dilakukan. Kepemimpinan kepala desa Bendosewu saat ini, saat mengupayakan adanya partisipasi dari masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dari erbagai pendekatan atau aspek kepemimpinan yang dilakukannya untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan di desa Bendosewu.

Menurut Hersey dan Blanchart dalam Pasolog (2008:47) Mengatakan bahwa "tidak ada satu cara terbaik untuk mempengaruhi orang lain". Gaya kepemimpinan yang diterapkan atau yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain tidak bisa ditumpukan pada satu gaya saja. Gaya kepemimpinan yang diterapkan seorang pemimpin harus melihat tingkat kematangan dari orang yang

akan dipengaruhinya. Selaras dengan pernyataan Hersey dan Blanchard bahwa gaya kepemimpinan sangat tergantung pada orang-orang yang akan dipengaruhi. Lebih lanjut Tjiptono dalam Pasolog (2008:47) menyebutkan bahwa "asumsi secara keseluruhan tentang teori situasional bahwa tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang tepat bagi masyarakat di Desa Bendosewu, pendekatan situasional dirasa cocok diterapkan pada kepemimpinan kepala desa di Desa bendosewu.

Kepemimpinan situasional mempunyai artian bahwa pemimpin yang baik harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan tuntutan dan kondisi serta situasi yang berbeda-beda di wilayahnya. Di desa bendosewu sendiri hal-hal yang dirasa mampu meningkatkan partisipasi masyarakat tidak dapat dilihat hanya dengan satu gaya saja. Kepala desa benar-benar dituntut untuk mampu menimbulkan adanya keterlibatan masyarakat dalam setiap aspek kepemimpinannya. Selain. Selain harus melihat kondisi serta situasi yang ada di lapangan, pemimpin dengan gaya situasional juga harus mampu melihat dan menyesuaikan gaya yang digunakannya dengan kondisi kematangan dari setiap bawahannya. Mengingat di desa Bendosewu memiliki masyarakat dengan beraneka ragam dan juga dengan kondisi yang berbeda-beda maka memang gaya situasional yang paling sesuai digunakan. Hal ini dapat dilihat dari sikap dari kepala desa Bendosewu yang dalam pelaksanaan kerjanya sehari-hari selalu menciptakan suasana kinerja yang harmonis, lebih mengedepankan kekeluargaan antara kepala desa dan perangkat desa lainnya. Sehingga yang terlihat di desa Bendosewu bahwasannya struktur tugas yang yang tertulis hanyalah sebagai

gambaran formalitas saja, namun praktek dilapangan kepala desa tidak terpaku dengan struktur tugas tersebut. Semua dilakukan dengan bersama-sama, dengan saling membantu sehingga memang tujuan dari kepala desa sendiri lebih mebngharmoniskan pemerintah desanya terlebih dahulu sebelum akhirnya nanti berjalan keluar untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat desa Bendosewu sendiri dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Maka dari itu, pendekatan situasional yang dirasa mampu menghadapi keberagaman masyarakat dengan tingkat kematangan masyarakat dan kondisi yang berbeda-beda. Kepala desa harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan keadaan yang ada untuk mempengaruhi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan di desa Bendosewu. Dengan baiknya kinerja dari perangkat desa sendiri menjadi satu kekuatan untuk pemerintahan desa lebih dapat meningkatkan partisipasi dari masyarakat agar mau terlibat dalam pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat desa yang dilakukan.

Berdasarkan dari fokus yang diambil yaitu sinergi pemerintah desa dalam pembangunan dan pemberdayaan desa, peneliti akan membahas hal-hal sebagai berikut :

#### **A. Pengambilan Keputusan Oleh Kepala Desa dengan perangkat desa yang Melibatkan Masyarakat dalam Pembangunan Infrstruktur Desa dan pemberdayaan masyarakat di Desa Bendosewu.**

Hal pertama yang harus dipahami yaitu bahwa administrasi berfungsi untuk menentukan arah tujuan dari sebuah organisasi dan merumuskan kebijakan-

kebijakan umum yang terkait dengan organisasi tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Tjokroamidjojo dalam Prinjono dan Mandala (2010:112) "salah satu fungsi dari administrasi publik yaitu merumuskan kebijakan, yang dalam prosesnya membutuhkan konsistensi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai". Oleh sebab itu, di dalam administrasi publik selalu mengupayakan tercapainya tujuan organisasi sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan tersebut, diperlukan adanya administrasi publik untuk memfasilitasi kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dan juga memfasilitasi pemimpin untuk dapat mengambil keputusan dengan baik sesuai dengan tujuan awal. Pengambilan keputusan merupakan aspek yang sangat penting dalam berjalannya sebuah kepemimpinan. Membuat keputusan merupakan salah satu fungsi dari pemimpin yang paling penting yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin.

Pengambilan keputusan menurut Siagan (2010:39) yaitu "sebuah pendekatan yang sistematis yang dilakukan oleh pemimpin untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi". Kepemimpinan seseorang pemimpin dalam sebuah organisasi mempunyai pengaruh besar dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukannya, sehingga membuat dan mengambil keputusan merupakan tanggung jawab yang merupakan tugas besar dari seorang pemimpin. Pengambilan keputusan merupakan pekerjaan yang selalu dilakukan oleh seorang pemimpin dalam

kepemimpinannya, oleh karena itu dalam mengambil keputusan pemimpin benar-benar harus berfikir dengan baik agar pengambil keputusannya bisa tepat.

Dalam sebuah pengambilan keputusan, kemampuan pengambilan keputusan yang baik tidak terlepas dari cara, hasil dan kemampuan menyampaikan hasil keputusan yang sudah diambil. Apapun hasil keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin harus dapat dinikmati masyarakat secara keseluruhan, namun hasil keputusan tersebut tidak terlepas dari bagaimana keputusan itu diambil. Sebab, kewenangan yang diberikan kepada pemimpin merupakan amanat yang harus benar - benar dilakukan, oleh karena itu setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan bermacam aspek yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan pada masyarakat.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis, hal yang di dapat yaitu gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala desa. Dalam pengambilan keputusan yaitu lebih kepada gaya kepemimpinan demokrasi relatif. dimana dalam pengambilan keputusan itu melibatkan partisipasi dari masyarakat dalam perumusan dan perencanaan kebijakan yang nantinya akan diputuskan oleh kepala desa. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh O'Learly (2005;17-21) bahwa ciri dari kepemimpinan model demokrasi relatif yaitu " adanya partisipasi dari masyarakat dalam semua aspek baik perencanaan, pengambilan keputusan sampai implementasi kebijakan yang sudah diambil dengan memperhatikan aspirasi atau pendapat dari pegawainya, mendorong perdebatan dan kekuatan memveto ".

Ketiga hal tersebut sudah tampak dalam gaya kepemimpinan yang diterapkan kepala desa Bendosewu, khususnya dalam hal keputusan oleh kepala desa yang melibatkan partisipasi dari masyarakat dalam pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan di sana. Masyarakat terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang ada di Desa Bendosewu. Hal itu dilakukan biasanya dalam forum atau perkumpulan desa yang mana dalam penentuan sebuah kebijakan atau kegiatan, masyarakat terlibat baik RT, RW, Pemuka Desa dan Perwakilan dari Perempuan dan perangkat desa di dalamnya mereka saling berdebat dan bertukar pikiran terkait dengan program yang akan dilaksanakan. Selain itu juga adanya perdebatan dalam setiap forum atau perkumpulan yang dilakukan oleh Kepala Desa Bendosewu. Kepala Desa beranggapan dengan adanya perdebatan atau tukar pikiran antara masyarakat berarti menunjukkan adanya keterlibatan masyarakat langsung dalam proses didalamnya.

Keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa Bendosewu lebih kepada pelaksanaan musyawarah desa terlebih dahulu. Dalam setiap pelaksanaan musyawarah atau rapat desa, masyarakat diberikan hak untuk mengeluarkan pendapatnya sehingga semua dituntut untuk menyampaikan pendapatnya dan sarannya. Namun, meskipun pengambilan keputusan melalui proses musyawarah tetapi akhir dari keputusan tetap diputuskan oleh Kepala Desa Bendosewu. Oleh karena itu dapat dikatakan kepemimpinan yang dilakukan Kepala Desa lebih pada gaya kepemimpinan demokrasi relatif. Sebab menurut O'Learly (2005;17-21) gaya kepemimpinan ini ditambahkan kata relatif karena meskipun didalam

pengambilan keputusan melibatkan partisipasi dari masyarakat namun, keputusan akhir tetap berada ditangan pemimpin. Dengan demikian , sangat jelas bahwa dalam kepemimpinan ini Kepala Desa Bendosewu lebih mengutamakan partisipasi dari masyarakat dalam pengambilan sebuah keputusan.

Dalam hal ini lebih difokuskan kepada pengambilan keputusan dalam pengadaan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan di Desa Bendosewu. Kepala Desa lebih mengutamakan pendapat masyarakat terlebih dahulu tentang pembangunan lingkungan seperti apa yang mereka inginkan. jadi masyarakatlah yang dituntut untuk dalam menyampaikan pendapat. Dalam gaya ini kepala desa juga semaksimal mungkin memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan yang akan dilakukan, sehingga masyarakat dalam terlibat nantinya.

Berdasarkan hal di atas, secara langsung peran kepala desa terlihat jelas sebagai pemimpin formal di wilayah desa. Kepala desa mendapatkan wewenang untuk mengambil sebuah keputusan yang tentunya keputusan yang diambil nantinya dapat bermanfaat dan menguntungkan masyarakat secara umum. Sesuai dengan pernyataan yang dikutip Robbins dalam Irwanto dan Wirawan (2008:11) "kepala desa sebagai pemimpin formal atau leader di desa mempunyai peran untuk bertindak secara formal maupun informal". Kepala desa Bendosewu di sini sebagai leader memberikan instruksi kepada perangkat desa terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan yang sudah direncanakan sebelumnya. Dan menghimbau bahwa seluruh masyarakat dapat terlibat di dalamnya. Dalam hal ini kepala desa Bendosewu juga telah melakukan perannya sebagai puncak struktur

kerja di desa yang mempunyai wewenang untuk menentukan keputusan meskipun dalam prosesnya melibatkan dari masyarakat. Dalam pengambilan keputusan ini kepala desa Bendosewu menggunakan gaya demokrasi relative juga melihat kondisi dan kematangan struktur tugas yang sesuai sebagai puncak pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan memang bawahannya gaya kepemimpinan demokrasi relative yang dirasa sesuai untuk pengambilan keputusan karena memang baik dari perangkat desa dan masyarakat sama-sama mempunyai kemampuan untuk bergabung dalam prosesnya, dan juga hal itu dilakukan agar tidak ada keputusan sepihak dari kepala desa.

Selain itu, kepala desa juga telah melakukan perannya sebagai pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan. Hal itu sesuai dengan yang dikemukakan oleh Irwanto dan Wirawan (2008:11) yaitu *resources allocator*. “Peran ini dilakukan oleh kepala desa untuk memastikan apakah prosedur kerja organisasi yang dilakukan sudah baik atau belum, dan sudah sesuai dengan prosedur, peraturan dan nilai organisasi yang ada atau belum”. Selain itu peran kepala desa juga dapat dilihat dari peranannya yang bersifat interpersonal poin yaitu *lesion manager*, “dalam hal ini seorang pemimpin bertindak sebagai puncak komunikasi dalam sebuah organisasi”. Seorang pemimpin mempunyai kemampuan lebih dalam membuat jaringan komunikasi dengan pihak lain untuk menambah informasi yang dapat menguntungkan untuk organisasinya.

Oleh sebab itu, berdasarkan hasil data yang sudah disajikan oleh peneliti dapat diasumsikan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa Bendosewu dalam

pengambilan keputusan lebih mengarah pada gaya demokrasi relative, seperti yang dikemukakan O’Learly (2005:17-21) sebagai berikut:

Ciri-ciri dari kepemimpinan demokrasi relative menurut O’Leraly yaitu:

- (1) Partisipasi. Pemimpin melibatkan partisipasi dari pegawai dalam semua aspek baik perencanaan, pengambilan keputusan sampai implementasi kebijakan yang sudah diambil dengan memperhatikan aspirasi atau pendapat dari pegawainya. Setiap anggota organisasi diharapkan mengetahui apa yang sedang terjadi dalam organisasinya dan sama-sama memikirkan apa yang akan dilakukan kedepannya.
- (2) Mendorong Perdebatan. Terkadang perdebatan memang dihindari dalam keberlangsungan sebuah organisasi. Namun disini, pemimpin yang demokrasi justru menanggapi dengan adanya perdebatan yang terjadi menggambarkan keterlibatan dari seluruh anggota dalam berjalannya organisasi kedepannya.
- (3) Kekuatan memveto. Kekuasaan mutlak seorang pemimpin yang membuat gaya kepemimpinan ini mendapat tambahan relative. Meskipun pemimpin melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya, dalam keputusan akhir tetap pemimpinlah yang membuat keputusan atas semua hal yang berkaitan dengan organisasinya.

**B. Komunikasi Kepala Desa dengan perangkat desa Kepada Masyarakat  
Dalam Pembangunan Infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Desa  
Bendosewu**

Komunikasi menurut Rivai dan <ulyadi (2009:336) yaitu:

“pengiriman atau penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi juga merupakan proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari

seseorang kepada orang lain. Selain itu komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi atau pengiriman dari seseorang kepada orang lain.”

Sesuai dengan pendapat di atas, berkaitan dengan komunikasi yang dilakukan oleh kepala desa Bendosewu kepada masyarakatnya. Sampai saat ini kepala desa Bendosewu telah melakukan perannya sebagai pemimpin dalam berkomunikasi, dimana kepala desa telah melakukan koordinasi dan kerja sama dengan perangkat desa kemudian pemberian informasi kepada masyarakat dan juga menerima informasi dari masyarakat atau pihak lainnya juga. Sejauh ini komunikasi yang digunakan kepala desa Bendosewu dengan masyarakat yaitu menggunakan informasi dua arah. Hal itu bias dilihat dari adanya diskusi antara kepala desa dengan perangkat desa dan masyarakat dalam forum rapat atau pertemuan desa yang mana di dalamnya terjadi komunikasi secara timbal balik yang dapat berupa penyampaian informasi baik kepala desa atau dari masyarakat terkait dengan program kerja maupun urusan lainnya yang terkait dengan urusan desa. Selain itu kepala desa bendosewu juga telah melakukan perannya sebagai fasilitator untuk mengarahkan masyarakat terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan agar tidak keluar dari jalur yang telah ditetapkan. Penyampaian komunikasi dari kepala desa kepada masyarakat diawali dengan berupa undangan yang dikoordinasikan dengan perangkat desa sebelumnya.

Arahan terkait dengan kegiatan pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat desa Bendosewu dilakukan kepala desa Bendosewu dilakukan secara langsung. Seperti salah satu contohnya yaitu kegiatan pembangunan jembatan. Arahan dari kepala desa yang jelas sangat penting, agar

dalam pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan dan sudah ditetapkan sebelumnya. Penyampaian arahan yang jelas tadi dapat menciptakan komunikasi yang efektif antara kepala desa dengan masyarakat di desa Bendosewu. Pemberian arahan yang dilakukan kepala desa Bendosewu di sini mengingat memang bahwa kematangan yang dimiliki masyarakat masih kurang, jadi memang perlu pengarahan agar pelaksanaan program bisa berjalan dengan lancar.

Oleh sebab itu, dengan adanya komunikasi yang baik yang dilakukan oleh kepala desa Bendosewu, menandakan bahwa komunikasi yang baik sangat dipegang oleh kepala desa demi mencapai tujuan bersama yang sudah ditentukan. Kemampuan seorang pemimpin dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat memegang peranan yang penting karena berhadapan langsung dengan berbagai macam watak yang berbeda-beda. Informasi yang diberikan maupun yang diterima dengan baik akan berdampak baik juga pada kegiatan yang akan dilakukan.

Dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan peneliti, dapat diasumsikan bahwa komunikasi yang telah dilakukan oleh kepala desa Bendosewu lebih mengarah pada gaya kepemimpinan konsultatif. Seperti yang dilakukan oleh Hersey dan Blanchard dalam Pasolog (2008:50) bahwa: “gaya konsultatif diterapkan kepada bawahan yang memiliki tingkat kematangan yang rendah ke sedang. dalam hal ini bawahan tidak mampu tetapi berkeinginan, memiliki keyakinan namun kurang memiliki pengetahuan. Dengan demikian, gaya konsultatif lebih memberikan pengarahan, karena kurang mampunya masyarakat untuk melakukannya. Perilaku konsultasi yang dirujuk karena semua

pengarahan dilakukan oleh seorang pemimpin. Namun dengan komunikasi dua arah penjelasan dari pemimpin tetap dilakukan namun tetap memperhatikan saran dan tanggapan dari masyarakat terkait masalah yang ada. Komunikasi dua arah dapat membantu dalam mempertahankan tingkat motivasi bawahan yang tinggi pada saat yang sama tanggung jawab dan control atas pembuatan keputusan tetap pada pemimpin.”

Apabila dikaitkan dengan hasil data yang telah diperoleh peneliti selama penelitian, dalam pelaksanaan sebuah kegiatan di desa bendosewu selalu diarahkan oleh kepala Desa. Pengarahan itu bertujuan agar pelaksanaan kegiatan nantinya dapat sesuai dengan yang dicita-citakan dari awal, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu kepala desa bendosewu menerapkan komunikasi dua arah dalam pelaksanaan kerjanya terutama yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, agar adanya komunikasi dua arah antara kepala desa dengan perangkat desa dan masyarakat ataupun sebaliknya.

Dalam pelaksanaan kerjanya sendiri di kantor desa, komunikasi yang baik juga dilakukan oleh kepala desa bendosewu. hal tersebut tercermin dari model kekeluargaan yang ditumbuhkan kepala desa dalam berkomunikasi dengan perangkat desa lainnya. Kepala desa ini seakan-akan menghilangkan adanya jenjang kerja atau struktur kerja yang sudah ada agar mampu melakukan komunikasi dengan baik dengan perangkat desa. Penciptaan suasana kerja yang harmonis dan kekeluargaan yang menjadi tujuan oleh kepala desa Bendosewu. Bapak kepala desa mempunyai pemikiran bahwasanya masyarakat akan ikut

berpartisipasi dengan baik, apabila dari perangkat desanya sendiri sudah kompak dan bekerjasama dengan baik juga untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat. Komunikasi yang terjadi di kantor desa Bendosewu antara kepala desa maupun sebaliknya sudah berjalan dengan baik, namun memang dalam beberapa kesempatan kepala desa tetap melakukan fungsinya sebagai fasilitator untuk memberikan informasi yang dia punya kepada perangkat desa, dan juga adanya konsultasi antara kedua belah pihak agar program-program yang ingin dilakukan dapat berjalan lancar.

Komunikasi itu dilakukan untuk mendapatkan saran dan tanggapan dari masyarakat terkait pembangunan dan pemberdayaan yang akan ataupun telah terjadi agar semakin baik untuk kedepannya. Selain itu komunikasi dua arah yang diterapkan kepala desa Bendosewu juga bermaksud untuk mengurangi adanya perangkat desa dan masyarakat yang pasif, hal itu dilakukan juga untuk memajukan desa Bendosewu sendiri. Peran dari kepala desa dalam mencari solusi dalam permasalahan yang ada dapat dilihat dari diskusi yang dilakukan dalam setiap kegiatan rapat atau pertemuan yang melibatkan perangkat desa dan masyarakat baik RT maupun RW. Oleh karena itu, gaya konsultasi cenderung digunakan oleh kepala desa Bendosewu dalam berkomunikasi dengan masyarakat karena tidak semua praktek pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan berjalan dengan lancar oleh sebab itu dibutuhkan arahan dari kepala desa dalam setiap pelaksanaan.

### **C. Pemberian Pengawasan oleh Kepala Desa Kepada perangkat desa dan Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Desa di Desa Bendosewu**

Menurut Siagan (2003:112) pengawasan yaitu “suatu proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”. Terdapat beberapa proses dalam pengawasan, Siagan (2003:115) teknik dasar pengawasan yang dilakukan oleh administrasi dan manajemen yaitu:

- 1). Pengawasan langsung. Pengawasan ini dilakukan sendiri oleh pemimpin terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya. Pengawasan langsung ini berupa: (a) inpeksi langsung, on-the-spot observation, dan (c) on-the-spot report;
- 2). Pengawasan tidak langsung. Merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin dari jauh. Pengawasan ini biasanya menggunakan pihak ketiga, dimana mereka melaporkan apa yang terjadi dan bagaimana hasil dari kegiatan itu yang dilaporkan dalam bentuk tulisan maupun lisan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis selama di lapangan, kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa Bendosewu dilakukan dengan dua cara yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan oleh kepala desa dengan turun langsung ke lapangan untuk memantau sejauh mana pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan yang berjalan. Sedangkan pengawasan secara tidak langsung dilakukan oleh kepala desa melalui pihak ketiga. namun berdasarkan hasil

wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti pengawasan secara tidak langsung lebih banyak dilakukan oleh kepala desa Bendosewu. Kepala desa Bendosewu sejauh ini lebih banyak melakukan pengawasan melalui pihak ketiga atau secara tidak langsung. Kepala desa lebih mengandalkan kepercayaan kepada perangkat desa maupun masyarakat terkait dengan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang ada, dengan kepercayaan bahwa pembangunan dan pemberdayaan dilakukan untuk dan oleh masyarakat, maka secara tidak langsung masyarakat akan semaksimal mungkin melaksanakan pembangunan serta pemberdayaan itu.

Pada aspek pengawasan ini gaya kepemimpinan oleh kepala desa Bendosewu lebih kepada gaya kepemimpinan kemitraan. Dimana kepala desa berasumsi bahwa antara kepala desa dan perangkat desa sama-sama mempunyai kedudukan yang sama untuk saling mengawasi kegiatan yang sedang berlangsung. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh O'Learly (2005:17-21) bahwa:

“Dalam gaya kepemimpinan kemitraan ini, adanya kesejajaran atau persamaan antara bawahan dan atasan. Seorang pemimpin menganggap dirinya sama dengan anggota lainnya meskipun pengalaman yang dimilikinya lebih banyak daripada lainnya. Selain itu juga berbagi tanggung jawab, dalam artian semua yang terjadi dalam organisasinya. Kepercayaan, kejujuran terhadap anggota merupakan aspek yang dibutuhkan dari kemitraan”.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh kepala desa Bendosewu dilakukan dengan dua cara yaitu pengawasan secara langsung dan tidak langsung. Namun yang lebih banyak dilakukan yaitu pengawasan secara tidak langsung dengan melalui pihak ketiga sebagai orang yang dipercaya untuk mengawasi berjalannya pembangunan dan pemberdayaan tersebut, seperti ketua RW dan RT. Pada aspek pengawasan ini gaya kepemimpinan yang dilakukan lebih pada gaya kepemimpinan kemitraan, hal itu ditunjukkan dengan pemberian kepercayaan kepada masyarakat dan ketua RT/RW untuk saling mengawasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan. Masyarakat mempunyai kedudukan sejajar dan diberikan kepercayaan untuk saling mengawasi berjalannya pembangunan serta pemberdayaan tersebut.

Hal serupa juga dilakukan kepala desa dengan perangkat desanya. Kepala desa Bendosewu di sini melakukan pengawasan kepada perangkat desa sendiri, kepala desa tidak melakukan dengan ketat dalam artian di sini apa yang terjadi di kantor desa Bendosewu mengalir sesuai apa yang seharusnya, tidak begitu mengawasi dengan ketat kinerja aparatur desanya. Namun kepala desa percaya bahwa mereka akan bekerja sebaik mungkin karena memang pengawasan selalu diberikan oleh kepala desa. Kepala desa Tamabakn di sini selalu menerapkan system kekerabatan yang baik dalam kerjanya dengan kepala desa meskipun kepala desa adalah puncak dari pemerintahan desa. Kepala desa juga memaparkan bahwa semua kepala desa mempunyai hak yang sama untuk sama-sama mengawasi kinerja mereka, jadi apabila ada perangkat desa yang tidak melakukan tugasnya dengan baik dapat diingatkan atau dilaporkan kepada kepala desa Bendosewu.

Dari situ memang terlihat bahwa system kepercayaan yang dilakukan kepala desa kepada perangkatnya dalam pengawasan kinerja sehari-hari.

**D. Pemberian Motivasi oleh Kepala Desa Kepada perangkat desa serta Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur Desa dan pemberdayaan masyarakat desa.**

Motivasi dapat diartikan sebagai sebuah dorongan terhadap diri sendiri untuk melakukan suatu kegiatan. dorongan di sini dapat bersumber atau berasal dari mana saja. Motivasi merupakan suatu sumber tenaga untuk mengerjakan suatu hal agar mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Wibowo (2010:379) motivasi merupakan “dorongan terhadap serangkaian perilaku manusia, sedangkan elemen yang terkandung dalam motivasi meliputi unsure membangkitkan, menjaga, menunjukkan intensitas, bersifat terus menerus dan adanya tujuan”. Dalam hal ini, pemberian motivasi yang dilakukan kepala desa Bendosewu dalam hal memotivasi masyarakat sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Siagian yaitu menetapkan tujuan akhir yang jelas dari pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan, dan juga membangun komitmen bersama dengan masyarakat untuk membangun desa agar lebih baik lagi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, pemberian motivasi yang dilakukan oleh kepala desa kepada perangkat desa serta masyarakat secara individual. Keyakinan yang dimiliki kepala desa yang bukan sekedar teori saja, hal itulah yang meyakinkan perangkat desa dan masyarakat bahwa pembangunan

serta pemberdayaan yang dilakukan kepala desa Bendosewu tidaklah main-main. Terkait motivasi yang dilakukan oleh kepala desa Bendosewu, sejauh ini telah sesuai dalam melakukan proses social yang dikemukakan oleh Hasibun (2011:150) yangmana dalam memotivasi masyarakat, diperlukan adanya penetapan tujuan yang jelas yang akan dicapai bersama. Tujuan ditetapkan secara adil dan tidak memihak suatu kepentingan dan tujuan serta ditetapkan atas dasar kesamaan persepsi yang kuat. Setelah menetapkan tujuan secara jelas dan pasti, maka akan didapat kepentingan dari suatu program akan berdampak.

Motivasi yang diterbitkan kepala desa Bendosewu kepada perangkat desa dan masyarakat tidak hanya sekedar meberikan semangat dan dorongan, maliankan dengan kehadiran secara langsung dalam setiap pembangunan yang ada, menjadi motivasi tersendiri bagi masyarakat sekitar. Partisipasi yang dilakukan secara langsung oleh kepala desa menunjukkan bahwa kepala desa telah memiliki sifat antusiasme pada poin (g) yang ada pada teori yang dikemukakan oleh Dibrin dalam Wirawan (2008:25) yaitu “pemimpin yang efektif harus antusias, karena akan menilai kegigihan dari pemimpin mereka” Dari pernyataan tersebut dapt dibuktikan dengan keikutsertaan kepala desa yang berperan aktif dalam pembangunan dan pemberdayaan yang ada di desa Bendosewu yang menjadikan motivasi tersendiri bagi masyarakat dan juga kegigihan dari seorang pemimpin bahwa kepala desapun mengupayakan kelancaran program tersebut untuk mencapai tujuan dan mendapatkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat terus-menerus.

Masyarakat berharap bahwa kepemimpinan kepala desa bendosewu dapat terus meningkatkan partisipasi dari masyarakatnya, kualitas kepemimpinan yang mengayomi masyarakat untuk tetap setia kepada kepemimpinannya. Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat yang dilakukan kepala desa memberikan kebutuhan akan perasaan ikut serta (*sense of participation*) yang dikemukakan oleh Siagan (2003:109) bahwa setiap orang akan merasakan kesenangan dan bergairah dalam melakukan kegiatan karena mereka telah diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses kegiatan, baik penyampaian ide, saran, kritik dan informasi dalam rangka pengambilan keputusan yang lebih tepat guna terutama yang menyangkut dampak dan pekerjaan yang diterimanya.

Berdasarkan dengan teori situasional, gaya kepemimpinan kepala desa dalam hal memberikan motivasi kepada perangkat desa dan masyarakat terkait dengan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yaitu lebih cenderung pada gaya partisipasi pemimpin. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Hersey dan Blanchard dalam Pasolog (2008:50) yaitu:

Gaya kepemimpinan ini diperuntukkan untuk bawahan pada tingkat kematangan sedang ke tinggi. Dalam hal ini bawahan memiliki kemampuan tapi tidak memiliki kemauan untuk menjalankan tugasnya. Perilaku yang dilakukan pemimpin lebih pada mendukung tanpa memberikan arahan. Gaya kepemimpinan ini dikatakan partisipasi karena pemimpin dan bawahan saling bertukar pikiran dan saling berkomunikasi dalam pelaksanaan tugas sebuah organisasi”

Hal ini juga terlihat dalam terlihat dalam kinerjanya sehari-hari dengan perangkat desa. Bapak kepala desa selalu memberikan motivasi secara langsung dengan aparaturnya. Apabila kepala desa bekerja dengan baik, maka perangkat desa juga akan meniru kinerja dari pemimpinnya. Motivasi selalu diberikan terlebih dahulu kepada perangkat desa, agar mereka mau bekerja keras untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Penciptaan suasana kerja yang harmonis juga menjadi salah satu motivasi untuk bekerja semaksimal mungkin. Bapak kepala desa juga dalam memberikan motivasi ini terkadang memang menghilangkan jarak antara struktur kepala desa dengan bawahannya yang memang diharapkan dapat menciptakan kekeluargaan yang tinggi agar bawahannya memiliki kenyamanan dalam pelaksanaan kinerjanya.

Jika dikaitkan dengan hasil observasi yang telah dilakukan peneliti, kematangan masyarakat desa Bendosewu berada pada tingkatan yang mampu tetapi tidak memiliki kemauan. Kekurangan masyarakat yang kurang memiliki kemauan disebabkan karena kurangnya keyakinan dalam dirinya untuk menciptakan motivasi di dalam diri masyarakat. Motivasi ini dilakukan dengan menetapkan tujuan akhir yang jelas dan usaha-usaha yang didukung dengan komitmen yang kuat untuk sama-sama mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan yang dilakukan. Pada gaya kepemimpinan ini, kepala desa melakukan interaksi sosial melalui komunikasi dalam mensosialisasikan tujuan akhir disetiap pembangunan yang dilaksanakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, dalam memotivasi masyarakat desa Bendosewu, kepala desa tergolong dalam gaya partisipasi pemimpin karena motivasi yang dilakukan tanpa

pengarahan melainkan dengan dukungan-dukungan yang dibutuhkan masyarakat melalui interaksi social melalui komunikasi berupa sosialisasi tujuan yang ditetapkan.

#### **4.6 Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat desa di Desa Bendosewu**

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan. Menurut Isbandi (2007:27) partisipasi masyarakat merupakan “keikut sertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternative solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi”. Dalam sebuah pembangunan yang berlangsung, partisipasi dari masyarakat merupakan hal utama yang sangat penting demi berlangsungnya pembangunan dan pemberdayaan itu. Seperti yang dikemukakan oleh Coyners (1991:154-155) bahwa pentingnya partisipasi adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sebuah alat untuk memperoleh informasi mengenai segala hal, yang tanpa kehadiran partisipasi itu pembangunan tidak akan berjalan lancar;
2. Masyarakat akan percaya dengan program pembangunan apabila mereka terlibat langsung di dalam proses pembangunan itu juga akan tumbuh rasa memiliki terhadap proyek pembangunan tersebut;

3. Partisipasi masyarakat merupakan hak demokrasi yang dimiliki masyarakat apabila dilibatkan dalam proses pembangunan yang ditujukan juga untuk kepentingan masyarakat sendiri.

Sesuai dengan teori itu menunjukkan bahwa keberadaan partisipasi sangat diperlukan dalam keberlangsungan pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan. Dan berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa masyarakat desa Bendosewu sudah berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan. Partisipasi yang dilakukan masyarakat desa Bendosewu dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa di desa Bendosewu yaitu merujuk pada teori yang disampaikan Ndraha dalam Suryono (2010:256) yaitu “partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam pembangunan sangat beraneka ragam”. Berkaitan dengan hal itu tampak bahwa ketertarikan masyarakat dalam pembangunan dilakukan dengan bermacam-macam cara.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di desa Bendosewu, didapatkan bahwa macam-macam partisipasi yang dilakukan masyarakat desa Bendosewu dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di desa Bendosewu adalah sebagai berikut:

#### **4.6.1 Partisipasi dalam Menerima dan Memberikan Informasi**

Keterlibatan masyarakat dalam memberikan dan menerima informasi di desa Bendosewu yang terjadi di masyarakat lebih berasal dari kepala desa. Kepala desa menjadi informan bagi masyarakat. Informasi diberikan melalui kepala dusun yang disampaikan kepada ketua RW yang selanjutnya dari RW

disampaikan kepada masyarakat. Jadi dapat dikatakan bahwa salam menerima informasi, masyarakat menerima informasi itu bersumber dari kepala desa yang melalui kepala dusun kepada RT maupun RW dan juga melalui pertemuan masyarakat. Sedangkan dalam memberikan informasi masyarakat juga terlibat yang dapat dilihat dari adanya diskusi saat pertemuan desa. Dimana informasi yang disampaikan oleh kepala desa diberikan tanggapan ataupun saran dari masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam menerima dan memberikan informasi entah itu bermaksud untuk menerima atau menolak informasi itu, masyarakat di desa Bendosewu sudah terlibat di dalamnya.

#### **4.6.2 Partisipasi dalam Memberikan Tanggapan dan Saran Terhadap Informasi, Baik Bermaksud Menolak dan Menerima**

Partisipasi dalam rangka memberikan tanggapan dan saran terhadap informasi yang mereka peroleh, sudah tampak di desa Bendosewu. Masyarakat memberikan tanggapan dan saran dari informasi yang didapatnya biasanya melalui rapat atau perkumpulan desa. Kepala desa telah memberikan ruang untuk masyarakat menanggapi atau memberikan saran terhadap pembangunan yang ada di Desa Bendosewu. Salah satu contohnya dalam perencanaan pembangunan dan pemberdayaan desa yang sudah di atur di RPJMdes, ibu kepala desa menjelaskan rencana pembangunan dan pemberdayaan baik prosedur dan segala macamnya, dan di situ masyarakat memberikan tanggapan atau saran terkait dengan keputusan kepala desa tadi entah untuk menerima maupun menolak informasi itu. Informasi biasanya dilakukan oleh kepala desa secara langsung maupun dari mulut ke mulut. Tanggapan yang diberikan masyarakat bermaksud untuk

meningkatkan atau memperbaiki pembangunan dan pemberdayaan yang ada agar desa Bendosewu semakin maju lagi, bukan untuk menghambat. Dari hal ini, dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Bendosewu dapat disimpulkan bahwa masyarakat terlibat dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang ada, lebih khusus di sini masyarakat berpartisipasi masyarakat secara langsung dalam memberikan tanggapan dan saran terhadap informasi yang mereka terima baik dari desa maupun secara langsung dari kepala desa.

#### **4.6.3 Partisipasi dalam Bentuk Perencanaan Pembangunan dan pemberdayaan, Termasuk Pengambilan Keputusan**

Partisipasi masyarakat desa Bendosewu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa sudah tuntas. Dari data yang dimiliki penulis, menunjukkan bahwa dalam perencanaan dan pengambilan keputusan kepala desa selalu melibatkan masyarakat di dalamnya. Dalam sebuah perencanaan dan pengambilan keputusan terkait dengan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan desa, kepala desa Bendosewu selalu mengadakan musyawarah terlebih dahulu. Dimana dalam forum atau perkumpulan desa itu nantinya masyarakat diberi kesempatan untuk mengutarakan keinginan pembangunan dan pemberdayaan yang seperti apa yang mereka inginkan untuk desa Bendosewu. Pengambilan keputusan sepenuhnya tetap berada di tangan kepala desa, namun dalam perencanaan dan proses pengambilan keputusan itu masyarakat selalu dilibatkan. Semua keputusan yang diambil oleh kepala desa selalu dengan

persetujuan masyarakat terlebih dahulu, biasanya di sini masyarakat diwakili oleh RT atau RW yang melakukan pertemuan atau rapat dengan kepala desa lalu diturunkan ke masyarakat. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa, adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan desa di sana.

#### **4.6.4 Partisipasi dalam bentuk Pelaksanaan Operasional Pembangunan dan pemberdayaan**

Berdasarkan data yang dimiliki oleh penulis dari wawancara yang sudah dilakukan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan di desa Bendosewu sudah ada namun masih dinilai kurang. Hal itu terjadi karena beberapa factor, salah satunya yaitu ketidak tepatan waktu pelaksanaan. Pelaksanaan pembangunan di desa Bendosewu sering dilakukan justru di hari kerja, dan hal itu yang membuat partisipasi masyarakat secara langsung menjadi kurang. Masyarakat lebih banyak mengutamakan kepentingan mereka sendiri daripada ikut serta dalam pembangunan desa. Selain itu, Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dikarenakan pembangunan yang ada di desa Bendosewu lebih ditumpukan pada orang-orang dari desa Bendosewu contohnya seperti pengambilan pelaksana pembangunan atau pekerjanya. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di sana, pemanfaatan Sumber Daya Manusia dari dalam desa sendiri kurang, sebaiknya pembangunan lebih dilakukan untuk dan oleh masyarakat desa Bendosewu sendiri. Hal ini menyebabkan masyarakat terkadang menjadi malas untuk ikut bergabung dalam pembangunan yang dilakukan. Selain itu kurangnya partisipasi

masyarakat juga merupakan dampak dari kurangnya pengawasan dari kepala desa saat pelaksanaan pembangunan di desa Bendosewu sendiri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan operasional pembangunan infrastruktur di Desa Bendosewu masih dinilai rendah dikarenakan beberapa hal yang sudah disebutkan di atas tadi.

#### **4.6.5 Partisipasi dalam Menerima Hasil Pembangunan**

Hasil dari pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat yang sudah dilakukan di desa Bendosewu, nyatanya sangat diterima oleh masyarakat dengan berbagai manfaat yang ditimbulkan. Hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan di sana sangat di terima dan sangat bermanfaat bagi masyarakat desa Bendosewu. Manfaat tersebut antara lain dengan adanya pembangunan jembatan yang dilakukan akan mempermudah masyarakat dalam melaksanakan kegiatan khususnya yang bermata pencaharian sebagai petani, dengan adanya jeembatan itu dapat mempermudah akses mereka untuk keluar masuk ke area persawahan. Selain itu dengan adanya pengaspalan jalan juga berdampak positif bagi masyarakat yaitu jalanan menjadi tidak banjir dan becek setelah terjadi hujan. Dan masih banyak lagi manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari hasil pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan di desa Bendosewu serta pemberdayaan desa seperti adanya posyandu balita dan lansia serta pengadaan sarana kerohanian yaitu masjid. Dan secara keseluruhan hasil dari pembangunan dan pemberdayaan tersebut juga melibatkan masyarakat yaitu dalam hal menerima hasil tersebut. Dapat disimpulkan bahwa hasil dari pembangunan yang telah dilakukan di desa Bendosewu secara keseluruhan sangat

diterima oleh masyarakat desa Bendosewu dan tentunya bermanfaat juga bagi kegiatan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa masyarakat terlibat dalam menerima hasil pembangunan dan pemberdayaan yang sudah dilakukan.

#### **4.6.6 Partisipasi dalam Menilai Hasil Pembangunan dan pemberdayaan**

Berdasarkan data yang sudah disajikan sebelumnya, keterlibatan masyarakat dalam memberikan nilai terhadap hasil dari pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa yang sudah dilakukan berdampak pada masyarakat desa Bendosewu juga. Hal itu berarti dalam pelaksanaannya masyarakat desa Bendosewu mempunyai hak untuk memberikan penilaian terhadap pembangunan yang sudah dilakukan. Kepala desa Bendosewu juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk menilai hasil dari pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa yang sudah tercapai. Hal itu bertujuan untuk memperbaiki pembangunan dan pemberdayaan yang sudah ada agar bisa lebih baik lagi. Dalam hal ini masyarakat mempunyai porsi tersendiri untuk memberikan penilaian terkait hasil yang telah tercapai atas baik buruknya pembangunan dan pemberdayaan itu dan manfaatnya secara umum.

Dari macam partisipasi yang telah dijelaskan dan merujuk kepada Ndraha dalam Suryono (2010:256), Dapat dilihat bahwa dari enam macam partisipasi yang ada dalam membangun desa hanya lima yang dari enam macam partisipasi yang dilakukan dengan baik oleh masyarakat desa Bendosewu. Satu diantaranya yang masih dirasa kurang yaitu partisipasi masyarakat dalam bentuk

pelaksanaan operasional pembangunan dan pemberdayaan. Hal itu dikarenakan beberapa factor yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan lima macam partisipasi lainnya sudah melibatkan masyarakat karena berdasarkan hasil data yang sudah disajikan menunjukkan lima partisipasi lainnya sudah melibatkan peran dari masyarakat di dalamnya.

#### **4.7 Hasil pembangunan Infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa yang telah dicapai**

Menurut Bintoro tjokroamidjojo (1980:59) pembangunan adalah suatu proses dinamis, pembangunan adalah usaha kearah tingkat kesejahteraan yang lenih baik, pembangunan juga merupakan proses tanpa akhir, suatu kontinuitas perjuangan untuk mewujudkan ide-ide dan realitas yang akan terus berkangsung sepanjang kurun waktu sejarahnya. Dalam sebuah pembangunan dan pemberdayaan, diperlukan adanya partisipasi dari masyarakatnya. Tingginya partisipasi masyarakat dalam sebuah pembangunan dan pemberdayaan juga berarti bagi hasil-hasil yang telah dicapai. Karena dengan adanya partisipasi dari masyarakat, maka berarti hasil itu milik masyarakat sendiri. Keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan yang telah dicapai juga tidak lepas dari campur tangan seorang pemimpin dalam menggerakkan masyarakat untuk turut berperan serta dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan.

Selama memimpin 3 tahun ini, kepala desa Bendosewu telah mencapai 3 hasil pembangunan dan 2 hasil pemberdayaan masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat desa Bendosewu. Diantaranya yaitu:

### 1. Perbaikan jalan atau pengaspalan jalan

Perbaikan atau pemavingan jalan ini dilakukan untuk mengatasi keluhan masyarakat terkait dengan kondisi jalan yang masih rusak. Dan saat ini hampir seluruh jalan di lingkungan yang ada di desa Bendosewu sudah diperbaiki dan di paving yang tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat desa Bendosewu sendiri;

### 2. Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PPJU)

Tujuan utama pengadaan PPJU ini yaitu tentunya untuk lebih menerangkan jalan di desa Bendosewu, selain itu desa juga lebih terlihat hidup dan untuk mengurangi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dengan kondisi terangnya jalan saat ini.

### 3. Pembangunan Jembatan

Salah satu yang menjadi permasalahan masyarakat desa Bendosewu sebelumnya yaitu susah akses menuju ke daerah persawahan. Pembangunan jembatan ini ditujukan untuk memudahkan masyarakat terutama petani untuk lalu lalang mereka menuju ke sawah. Dan sejauh ini masyarakat sangat terbantu dengan adanya pembangunan jembatan yang dilakukan di daerah menuju area persawahan di desa Bendosewu.

Pemaknaan pemberdayaan masyarakat menurut Madekhan Ali (2007 : 86) yang mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut ini :

“Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah bentuk partisipasi untuk membebaskan diri mereka sendiri dari ketergantungan mental maupun fisik.

Partisipasi masyarakat menjadi satu elemen pokok dalam strategi pemberdayaan dan pembangunan masyarakat, dengan alasan; pertama, partisipasi masyarakat merupakan satu perangkat ampuh untuk memobilisasi sumber daya lokal, mengorganisir serta membuka tenaga, kearifan, dan kreativitas masyarakat. Kedua, partisipasi masyarakat juga membantu upaya identifikasi dini terhadap kebutuhan masyarakat”.

Kepala desa Bendosewu juga 2 hasil pemberdayaan masyarakat yang bermanfaat bagi masyarakat desa Bendosewu. Diantaranya yaitu:

1. pengadaan posyandu balita dan lansia

Pelaksana kegiatan ini dilakukan dengan anggota masyarakat yang telah dilatih menjadi kader kesehatan setempat dibawah bimbingan Puskesmas. sedangkan Pengelola posyandu, adalah pengurus yang dibentuk oleh ketua RW yang berasal dari kader PKK, tokoh masyarakat formal dan informal serta kader kesehatan yang ada di desa bendosewu.



**Gambar 4.10 Kegiatan posyandu desa Bendosewu**  
Sumber : Dokumen Peneliti

## 1. Pengadaan masjid sebagai sarana ibadah masyarakat

Pemberdayaan tempat-tempat ibadah sangat penting dilakukan. Pemerintah desa Bendosewu melakukan pengadaan masjid dengan tujuan, menciptakan perilaku social yang beragama dan mental yang baik selain sebagai sarana beribadah bagi umat muslim. pembangunan masjid, mushola dan kelompok pengajian ini sangat penting untuk diperhatikan. Terutama untuk mengawal mental perilaku masyarakat dari sisi keagamaan.

Serangkaian pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang terjadi di desa Bendosewu tersebut dilakukan bertujuan untuk menjaga dan membangun desa agar lebih maju lagi baik sector infrastruktur maupun lainnya yang terkait, dan tentunya tujuan utamanya untuk memudahkan kehidupan masyarakat desa Bendosewu sehari-hari. Seperti yang dikemukakan oleh Canning dan Pedroni (2004:11) bahwa infrastruktur merupakan sebagai pendorong berkembangnya sector-sektor terkait sebagai *Multiplier*, maka dapat disimpulkan bahwa sector infrastruktur merupakan fundamental perekonomian di Indonesia.